



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2009 - 2011



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BENER MERIAH**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2009 - 2011**

Katalog : 9302008.1117
Ukuran Buku : 21 x 28,5 Cm
Jumlah Halaman : 71 Halaman
Naskah : BPS Kabupaten Bener Meriah
Penyunting : BPS Kabupaten Bener Meriah
Gambar Kulit : BPS Kabupaten Bener Meriah

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bener Meriah

BOLEH DIKUTIP DENGAN MENYEBUTKAN SUMBERNYA

KATA PENGANTAR

Salah satu alat untuk mengukur keberhasilan serta kemajuan pembangunan ekonomi di tingkat kabupaten/kota yaitu dengan menghitung Produk Domestik Regional Bruto. Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2009–2011 ini adalah publikasi ke lima PDRB dengan menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Pergantian tahun dasar dilakukan karena struktur ekonomi Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2000 sudah berbeda dengan struktur ekonomi tahun 1993. Disamping itu secara nasional perekonomian pada tahun 2000 dianggap lebih stabil atau mulai pulih kembali setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997-1998.

Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Bener Meriah secara deskriptif dengan visualisasi grafik dan tabel. Pada bagian lampiran disajikan angka-angka pendapatan regional tahun 2009 sampai dengan 2011 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 disertai dengan indeks berantai. Untuk melengkapi ulasan tabel-tabel tersebut disajikan juga konsep, definisi, serta metodologi penghitungan PDRB menurut lapangan usaha.

Penyajian menurut lapangan usaha dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi Kabupaten Bener Meriah, Perkembangan ekonomi secara keseluruhan dan perkembangan masing-masing sektor.

Kurang lengkapnya data dasar yang tersedia terutama tahun 2011 menyebabkan adanya beberapa sektor yang disajikan masih bersifat sementara, dan akan disempurnakan dalam publikasi berikutnya.

Publikasi ini adalah hasil kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bener Meriah. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan data serta bantuan lainnya sehingga publikasi ini bisa terwujud.

Segala kritik dan saran dari pengguna data sangat kami harapkan demi penyempurnaan publikasi ini dimasa mendatang. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Redelong, 15 Juni 2012

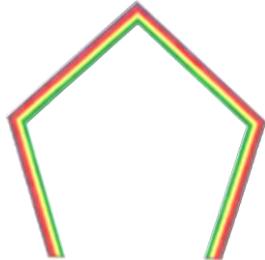
**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BENER MERIAH**



TETI DARMAWATI, SE
NIP. 19671208 199212 2 001



LAMBANG DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH (MUSARA PAKAT)



- Bentuk Segilima
Melambangkan jiwa dan semangat rakyat Bener Meriah berlandaskan kepada Pancasila.
- Empat Warna mengelilingi Segilima
Melambangkan Sarak Opat yang melambangkan sistem Pemerintahan Adat Tanoh Gayo.
Kuning : Reje (Bupati), Si Musepet Suket
Hijau : Imem (MPU) , Si Muperlu Sunet
Merah : Petue (Tokoh/Cendekiawan) Si Musidik Sasat.
Hitam : Rakvat (DPRD) Musara Pakat.



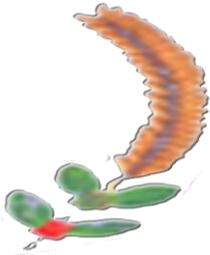
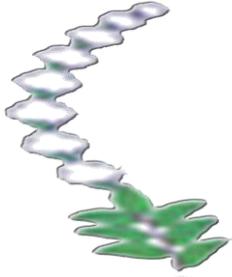
- Bintang Bersudut Lima dan berwarna Hijau
Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa



- Bener Meriah
Tulisan yang terdapat dipuncak Tugu Rimba Raya merupakan nama Kabupaten Pemekaran Kabupaten Aceh Tengah



- Gunung Berapi Bur Ni Telong.
Melambangkan keagungan atas anugerah Illahi yang memberikan kesuburan alam, ketegaran dan keteguhan hati rakyat untuk membangun
- Tugu Radio Rimba Raya.
Merupakan monument sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dimana melalui Radio Rimba Raya ini disiarkan keseluruh penjuru dunia bahwa Indonesia masih tetap ada.



- Padi dan Kapas.
Melambangkan Keadilan Kemakmuran Dan Kesejahteraan Sosial
- 17 buah Kopi, 8 Tangkai Bunga Kapas dan 45 butir Padi.
Diartikan Sebagai Lahirnya Bangsa Indonesia Dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
- 4 helai daun kopi, 10 butir buah kopi warna hijau dan 7 butir berwarna merah.
Menggambarkan bahwa kopi merupakan tanaman perkebunan rakyat yang menjadi andalan untuk membangun Bener Meriah ke empat penjuru arah mata angin adil dan merata dengan harapan baru esok lebih baik dari hari ini.
- 7 helai daun tembakau.
Menggambarkan 7 kecamatan perintis berdirinya Kabupaten Bener Meriah dan tembakau merupakan salah satu tanaman
- Gajah Putih.
Menggambarkan titisan seorang putra Raja Linge Yang bernama Bener Meriah.
- Gajah Putih menghadap kedepan di dalam bingkai Merah Putih.
Melambangkan berpandangan jauh kedepan untuk membangun dengan mendengar aspirasi rakyat di dalam satu komando demi kebenaran serta tetap bernaung dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Musara Pakat.
Merupakan semboyan yang bermakna. Satu haluan dan satu tujuan dengan mengkedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman

Arti Kiasan Warna

- Kuning : Mulia, Jaya, warna kebesaran kerajaan.
- Merah : Berani, kekuatan, symbol Panglima dalam kerajaan.
- Hitam : Berwibawa dan rendah hati.
- Putih : Suci, bersih dan bersahaja.
- Biru : Agung dan berpandangan luas.
- Hijau : Islami, sejuk dan subur.

Kejayaan Bener Meriah didukung kekuatan rakyat yang rendah hati bersih dan bersahaja serta berpandangan luas dialam yang sejuk dan subur serta bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LAMBANG DAERAH	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL DALAM URAIAN	v
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
I. PENDAHULUAN	
Latar Belakang	2
Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	2
Tujuan dan Kegunaan Statistik Produk Domestik Regional Bruto	5
Konsep dan Defenisi	7
Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	9
Penyajian Agregat PDRB	11
Perubahan Tahun Dasar	12
II. TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN BENER MERIAH	
Pertumbuhan Ekonomi	16
Perkembangan Ekonomi Sektoral	20
Struktur Ekonomi	25
Peranan Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB	27
Perkembangan PDRB dan Pendapatan Regional Per Kapita	30
Inflasi/Deflasi	32
LAMPIRAN	
A. Lingkup dan Metode Penghitungan	35
B. Daftar Istilah Penting	55
Tabel-Tabel	58

DAFTAR TABEL DALAM URAIAN

2.1.	PDRB Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007-2011	17
2.2.	Peranan Pertumbuhan Sektoral dan Struktur Ekonomi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2009–2011 (persen)	19
2.3.	Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor Pertanian di Kabupaten Bener Meriah 2009 - 2011 (persen)	21
2.4.	Struktur Ekonomi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008- 2011 (persen)	27
2.5.	PDRB Per Kapita Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 - 2011	30
2.6.	Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 - 2011	31
2.7.	Indikator Inflasi Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Bener Meriah menurut Sektor Tahun 2007-2011 (persen)	33

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

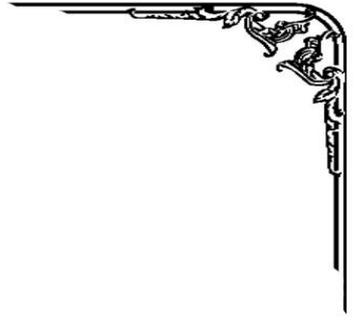
Tabel 1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2011 (Juta Rupiah)	59
Tabel 2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011 (Juta Rupiah)	60
Tabel 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2011	61
Tabel 4.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011	62
Tabel 5.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2011	63
Tabel 6.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011	64
Tabel 7.	Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2011	65
Tabel 8.	Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011	66
Tabel 9.	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011	67
Tabel 10.	Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2011	68
Tabel 11.	Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011	69
Tabel 12.	Indeks Perkembangan Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2011	70

Tabel 13.	Indeks Perkembangan Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011	71
Tabel 14.	Indeks Berantai Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2011	72
Tabel 15.	Indeks Berantai Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011	73
Tabel 16.	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Regional Kabupaten Bener Meriah Tahun 2009-2011	74

<http://benermeriahkab.bps.go.id>

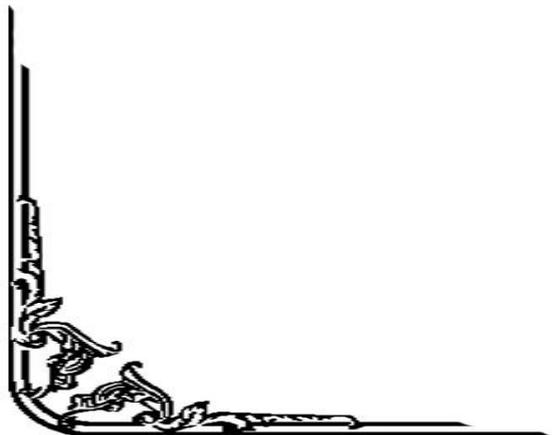
DAFTAR GAMBAR

2.1.	Perkembangan PDRB Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 - 2011	18
2.2.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bener Meriah Sektor Pertanian Tahun 2008–2011 (persen)	22
2.3.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bener Meriah Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Tahun 2008-2011 (persen)	24
2.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bener Meriah menurut Sektor Tahun 2008-2011 (persen)	25
2.5.	Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011	29
2.6.	Laju Pertumbuhan Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007-2011 (persen)	32



PENDAHULUAN

<http://www.dine.com>



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijaksanaan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijaksanaan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

1.2. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam

suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB merupakan neraca makro ekonomi yang dihitung secara konsisten dan terintegrasi dengan berdasar pada konsep, definisi, klasifikasi dan cara penghitungan yang telah disepakati secara Internasional.

Perubahan nilai PDRB dari waktu ke waktu terjadi karena dua hal, yaitu terjadi perubahan harga barang dan jasa atau karena terjadi perubahan volume. Penggunaan harga yang berlaku pada periode yang telah lalu menghasilkan PDRB atas harga konstan. PDRB atas harga konstan disebut sebagai PDRB volume atau real. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan masih tahun 2000. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Menghitung nilai tambah (PDRB) masing-masing sektor produksi terhadap output dengan cara mengurangi output dengan barang dan jasa yang dibeli dari unit produksi lain dan habis digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Sisanya adalah nilai tambah. Barang atau jasa yang habis dipakai tersebut dinamakan konsumsi antara. Nilai tambah dapat dinyatakan dalam nilai bruto atau netto tergantung apakah sudah dikurangi dengan penyusutan barang modal. Atau PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan,
2. Pertambangan dan Penggalian,
3. Industri Pengolahan,

4. Listrik, Gas dan Air Bersih,
5. Bangunan,
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran,
7. Pengangkutan dan Komunikasi,
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba,
- (2) konsumsi pemerintah,
- (3) pembentukan modal tetap domestik bruto,
- (4) perubahan stok, dan
- (5) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Di samping sebagai salah satu indikator dari data PDRB dapat juga diturunkan beberapa indikator ekonomi penting lainnya, seperti:

1. **Produk Regional Bruto**, yaitu PDRB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.
2. **Produk Regional Neto atas dasar harga pasar**, yaitu PDRB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.
3. **Produk Regional Neto atas dasar biaya faktor produksi**, yaitu produk regional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, produk regional neto atas dasar biaya faktor produksi disebut sebagai Pendapatan Regional.
4. **Angka-angka per kapita**, yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Statistik Produk Domestik Regional Bruto

Data produk domestik regional bruto adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB harga berlaku juga menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu daerah.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Apabila dibandingkan angka-angka nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dengan angka-angka tahun sebelumnya maka akan diketahui besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah baik secara keseluruhan maupun secara sektoral. Apabila dibandingkan angka-angka nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dengan angka-angka tahun sebelumnya maka akan diketahui besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah baik secara keseluruhan maupun secara sektoral.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Dengan melihat angka persentase setiap sektor tersebut, selain dapat diketahui sumbangan atau kontribusi masing-masing sektor, sekaligus juga dapat dilihat struktur perekonomian daerah yang bersangkutan. Dengan demikian dapat diketahui apakah perekonomian daerah bersifat agraris atau non agraris. Apabila pendapatan regional dikumpulkan dari waktu ke waktu, maka akan terlihat perubahan kontribusi masing-masing sektor serta perubahan struktur ekonominya.
4. PDRB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah sedikit banyaknya harus mempunyai angka pembandingan dari daerah lain, sedangkan untuk mengetahui perkembangannya perlu diketahui angka perkembangan pendapatan secara berkala.
8. Perbandingan antara pendapatan regional atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan merupakan angka indeks implisit yang dapat dipergunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan.

9. Elastisitas kesempatan kerja dengan bantuan data tenaga kerja yang apabila disajikan bersama-sama secara series dari waktu ke waktu, maka dapat dihitung angka elastisitas kesempatan kerja terhadap pendapatan regional. Elastisitas kesempatan kerja ini mencerminkan pengaruh kenaikan/penurunan pendapatan regional terhadap kesempatan kerja. Perlu ditekankan disini bahwa kenaikan pendapatan regional bukan saja disebabkan oleh adanya kesempatan kerja yang bertambah tetapi juga disebabkan adanya penambahan modal. Pengaruh dari dua faktor ini sangat sulit dipisahkan.
10. Untuk melihat produktifitas per sektoral yaitu dengan membagi jumlah nilai tambah dari sektor yang bersangkutan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut. Produktivitas tenaga kerja sektoral ini sangat berguna untuk mempertimbangkan penentuan alokasi tenaga kerja secara sektoral.

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan berbagai macam data statistik guna mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pada masa lalu serta untuk membuat perencanaan dan kebijakan demi tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditentukan pada masa mendatang secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil-hasilnya dan mengusahakan pergeseran proses kegiatan ekonomi dari sektor primer ke arah sekunder dan tersier. Upaya ini secara keseluruhan dimaksudkan untuk mengusahakan peningkatan pendapatan masyarakat secara mantap dan diikuti oleh tingkat pemerataan yang sebaik-baiknya.

1.4. Konsep dan Definisi

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu negara atau daerah dapat dilihat melalui neraca ekonominya. Seperti telah diterangkan sebelumnya perhitungan-perhitungan ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan tujuan penggunaannya. Lebih lanjut akan diuraikan konsep dan definisi yang digunakan untuk perhitungan pendapatan regional.

Konsep dan definisi menjadi amat penting untuk memahami lebih lanjut mengenai data yang tersedia. Arti, wujud fisik, karakteristik, batasan dan sifat kegiatan tentang eksistensi, perubahan dan perpindahan suatu barang dan jasa harus tercermin jelas dalam konsep dan definisi. Definisi yang berbeda akan menghasilkan data yang berbeda pula. Perlu diingat bahwa konsep dan definisi yang termaktub dalam buku ini pada dasarnya untuk tujuan penyusunan neraca regional.

1.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dapat diartikan kedalam tiga pengertian, yaitu:

- a. Menurut pengertian produksi, PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah (region) dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
- b. Menurut pengertian pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam pengertian Produk Domestik Regional Bruto, kecuali faktor pendapatan di atas, termasuk pula komponen penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto. Semua komponen pendapatan ini secara sektoral disebut Nilai Tambah Bruto, sehingga Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai penjumlahan pada nilai tambah dari seluruh sektor (lapangan usaha).
- c. Menurut pengertian pengeluaran, PDRB adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi Pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu hubungan bahwa jumlah pengeluaran untuk berbagai kepentingan tadi harus sama dengan jumlah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama juga dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya. Produk Domestik Regional Bruto seperti yang telah diuraikan di atas disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar, karena tercakup

didalamnya komponen pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto merupakan jumlah pajak tak langsung dikurangi subsidi.

1.4.2. Produk Regional Bruto (PRB)

PRB merupakan Produk Domestik Regional Bruto ditambah balas jasa faktor produksi milik penduduk wilayah tersebut yang berasal dari luar dikurangi balas jasa faktor produksi yang mengalir keluar milik penduduk luar wilayah.

1.4.3. Produk Regional Neto (PRN)

PRN merupakan Produk Regional Bruto dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan selama setahun.

1.4.4. Produk Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor Produksi

PRN atas dasar biaya faktor produksi adalah Produk Regional atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tak langsung. Pajak tak langsung neto sendiri merupakan pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tak langsung maupun subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual, hanya pajak tak langsung bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya Produk Regional Neto atas dasar biaya faktor produksi disebut sebagai pendapatan regional. Oleh karena data tentang arus faktor pendapatan yang keluar maupun yang masuk ke Kabupaten Bener Meriah sulit dipantau maka faktor pendapatan neto dari luar wilayah atau daerah ini diprediksikan dengan melakukan survei khusus.

1.4.5. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB per kapita merupakan merupakan Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Regional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

1.5. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan secara berkelanjutan dan berkala sangat berguna untuk mengetahui perkembangan sektor ekonomi secara riil, karena pada penghitungan ini tidak terkandung perubahan harga barang, melainkan hanya perubahan indikator produksinya saja. Untuk itu diperlukan penetapan tahun dasar secara nasional sebagai acuan perbandingannya. BPS telah menetapkan tahun 2000 sebagai tahun dasarnya. Sedangkan tahun dasar sebelumnya adalah tahun 1993. Untuk menghitung nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan dikenal empat penghitungan yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1.5.1. Revaluasi

Metode revaluasi dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga tahun dasar 2000 dan hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan 2000. Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil selisih antara output dan biaya antara hasil penghitungan di atas.

Metode ini sangat sulit dilakukan terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang terlalu banyak dan juga data harga kurang tersedia. Karena itu biaya antara atas dasar harga konstan diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

1.5.2. Ekstrapolasi

Dengan metode ekstrapolasi nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan tahun 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung.

Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap perhitungan output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

1.5.3. Deflasi

Untuk memperoleh nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dapat dilakukan dengan metode deflasi yaitu dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan Indeks Harga Konsumen, Indeks Harga Perdagangan Besar dan sebagainya.

Indeks harga di atas dapat pula dipakai sebagai inflator dalam keadaan dimana nilai tambah atas dasar harga yang berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

1.5.4. Deflasi Berganda

Yang dideflasi dalam deflasi berganda ini adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan Indeks Harga Produsen atau Indeks Perdagangan Besar sesuai dengan cakupan komoditasnya, sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar.

Metode ini tidak banyak digunakan dalam perhitungan karena kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, disamping karena komponennya terlalu banyak juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Penghitungan komponen penggunaan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan juga dilakukan dengan menggunakan cara-cara di atas, tetapi mengingat data yang tersedia kurang lengkap maka cara deflasi dan ekstrapolasi lebih banyak dipakai.

1.6. Penyajian Agregat PDRB

Pada publikasi ini penyajian angka agregat pendapatan selalu dilakukan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, yang masing-masing dapat dibedakan berikut ini:

- a. Untuk penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi,

biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen penggunaan Produk Domestik Regional Bruto.

- b. Penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang tetap yang terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga konstan, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan satuan output (riil) dan bukan karena harga. Saat ini tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2000.

Dalam penyajian statistik PDRB dikenal tiga macam indeks untuk menggambarkan perubahan agregat-agregat pendapatan ini, yaitu indeks perkembangan, indeks berantai dan indeks implisit yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Indeks perkembangan*, diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun terhadap tahun dasar.
- b. *Indeks berantai*, diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya, dikalikan 100. Jadi angka tahun sebelumnya selalu dianggap 100. Indeks ini menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
- c. *Indeks implisit*, diperoleh dengan membagi nilai atas dasar harga berlaku dengan nilai atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahunnya, dikalikan dengan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Selanjutnya bila dari indeks implisit ini dibuat indeks berantainya, akan terlihat tingkat perkembangan harga barang dan jasa setiap tahun terhadap tahun sebelumnya.

1.7. Perubahan Tahun Dasar

Seperti telah disebutkan di awal, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan dalam versi PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu apabila semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dinilai berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan, dan PDRB atas dasar harga konstan, yaitu apabila semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan harga pada tahun tertentu yang dipilih sebagai tahun dasar.

Pada prakteknya penggunaan tahun dasar sebagai dasar penghitungan PDRB atas dasar harga konstan selalu mengalami pemutakhiran. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga agar nilai PDRB atas dasar harga konstan yang dihasilkan dapat tetap menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah secara realistis.

Penggunaan tahun dasar dalam penghitungan PDRB secara Nasional telah mengalami perubahan empat kali, yaitu tahun 1960, 1973, 1983, dan tahun 1993. Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir harga yang digunakan untuk menghitung PDRB atas dasar harga konstan adalah harga pada tahun 1993. Namun demikian, perubahan struktur ekonomi akibat perkembangan global yang demikian pesat selama satu dasawarsa terakhir telah membuat pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan harga tahun 1993 menjadi lebih rendah, sehingga tidak lagi dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, BPS terdorong untuk mengganti tahun 1993 dengan tahun 2000 sebagai tahun dasar penghitungan karena situasi perekonomian dan alasan teknis berikut:

- a. Perubahan struktur ekonomi yang relatif cepat serta perubahan komposisi harga antara sektor primer, sekunder dan tersier mengakibatkan pengukuran pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB tahun dasar 1993 menjadi terlalu rendah.
- b. Struktur ekonomi tahun 1993 belum tersentuh dampak deregulasi dan debirokratisasi. Sektor pertanian dan pertambangan sangat dominan, sementara sektor industri relatif masih kecil peranannya. Sejak tahun 1991 peranan sektor industri sudah melampaui peranan sektor pertanian.
- c. Saat ini, tenggang waktu dari tahun 1993 sudah terlalu jauh sehingga apabila mengukur pertumbuhan berdasar pada tahun 1993 menjadi tidak realistis. Perkembangan ekonomi dunia dalam kurun waktu 1993-2000 yang diwarnai oleh globalisasi telah mempengaruhi perekonomian domestik.
- d. Pada pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi juga merubah struktur perekonomian Nasional.
- e. Perekonomian Indonesia selama tahun 2000 relatif stabil dengan laju pertumbuhan PDB sebesar 4,92 persen dan inflasi pada posisi 9,35 persen. Sejak tahun 2000 hingga 2003 pertumbuhan ekonomi secara agregat terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu bisa bermakna sebagai awal berjalannya proses pemulihan ekonomi setelah krisis

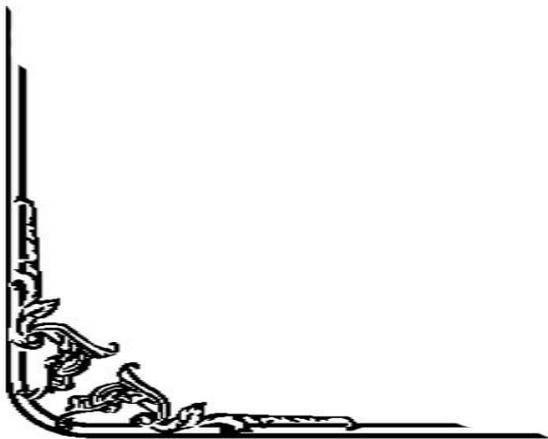
yang membuat PDB merosot sampai minus 13,13 persen di tahun 1998 dengan inflasi hingga mencapai 77,63 persen.

- f. BPS telah menyusun Tabel Input-Output Indonesia 2000. Tabel I-O tersebut secara baku dipakai sebagai basis penghitungan series PDB baik sektoral maupun penggunaan. Besaran PDB yang diturunkan dari Tabel I-O telah mengalami uji konsistensi pada tingkat sektoral dengan mempertimbangkan kelayakan struktur permintaan maupun penawaran.
- g. Dalam waktu dekat, penyusunan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) maupun Indeks Harga Konsumen (IHK) akan menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Penyempurnaan metodologi dan cakupan komoditi akan menghasilkan series IHPB dan IHK yang lebih akurat sebagai deflator dalam penghitungan PDB.
- h. Ketersediaan data dasar sektor ekonomi baik harga maupun volume secara rinci tahun 2000, relatif lebih lengkap dan berkelanjutan dibandingkan tahun 1993. Hal itu dimungkinkan karena berbagai departemen/kementerian maupun instansi pemerintah lainnya ikut membangun statistik bagi keperluan perencanaan sektoral masing-masing. Dengan dukungan data-data yang lebih lengkap dan terperinci serta konsisten, diharapkan estimasi PDB dengan tahun dasar 2000 dapat disusun lebih akurat dan konsisten.
- i. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagaimana tertuang dalam buku panduan "Sistem Neraca Nasional" yang terbaru merekomendasikan bahwa estimasi PDB atas dasar harga konstan sebaiknya dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun referensi yang berakhiran 0 dan 5. Hal ini juga sudah didukung oleh komitmen pimpinan kantor statistik negara Asean pada tahun 2000 dengan maksud agar besaran angka-angka PDB dapat saling diperbandingkan antar negara dan antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian dunia.

Dengan demikian, pemutakhiran tahun dasar penghitungan PDRB dari tahun 1993 ke tahun 2000 menjadi perlu dilakukan agar hasil estimasi PDRB sektoral maupun penggunaan menjadi lebih realistis.



***TINJAUAN EKONOMI
KABUPATEN BENER
MERIAH 2011***



II. TINJAUAN EKONOMI BENER MERIAH

PDRB merupakan indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi, yang diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun meskipun peningkatan pada PDRB merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, perekonomian suatu daerah baru dapat dinyatakan berkembang apabila rata-rata pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan (trend) meningkat dalam jangka panjang.

Kabupaten Bener Meriah adalah kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah yang terbentuk pada tahun 2003 (UURI No. 41 Tahun 2003 Tanggal 18/12/2003). Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah mulai aktif melakukan kegiatan pada tahun 2004. Sebagaimana yang diamanatkan UU tentang Otonomi Daerah, Kabupaten baru ini harus mampu menggali potensi ekonomi yang ada di wilayahnya sendiri sehingga dapat mewujudkan kemakmuran bagi masyarakatnya. Meskipun bias, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan.

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tujuan otonomi daerah untuk memperkuat basis perekonomian Kabupaten Bener Meriah nampaknya sudah mulai terlihat dari efek otonomi daerah yang diindikasikan dari PDRB Kabupaten Bener Meriah sejak tahun 2005 sampai sekarang, dimana pertumbuhan ekonomi diatas 2,9 persen, dan secara signifikan terus mengalami perkembangan pertumbuhan diatas 4 persen sejak tahun 2006. Atas dasar harga berlaku, PDRB Bener Meriah terus menerus mengalami peningkatan. Pada periode tahun 2000-2003 (sebelum pemekaran), total PDRB Bener Meriah berfluktuasi antara 493,60 milyar rupiah sampai dengan 725,63 milyar rupiah. Setelah pemekaran, tahun 2004, angka tersebut menjadi 846,76 milyar rupiah, dan terus meningkat hingga mencapai nilai 1.985,89 milyar rupiah di tahun 2011. Namun tentunya besaran tersebut masih mengandung perubahan kenaikan harga barang dan jasa. Sedangkan atas dasar harga konstan 2000, total PDRB Bener Meriah tahun 2011 adalah sebesar 794,98 milyar rupiah.

Dengan melihat pertumbuhan angka-angka tersebut, dapat dikatakan bahwa perekonomian Bener Meriah sebelum dan setelah pemekaran menunjukkan kinerja yang terus membaik.

Tabel 2.1.

PDRB Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 - 2011

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	1.146.666,69	12,48	661.863,19	4,24
2008	1.343.963,43	17,31	690.306,66	4,30
2009	1.572.898,48	17,04	721.644,27	4,54
2010	1.780.389,79	13,19	756.359,92	4,81
2011**	1.985.889,85	11,54	794.975,57	5,11

* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

Berikut adalah grafik perkembangan nilai produk domestik regional bruto Kabupaten Bener Meriah, ditinjau berdasarkan harga berlaku dan harga konstan, selama periode tahun 2007-2011.

Gambar 2.1.
Perkembangan PDRB Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007-2011



Penghitungan pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya diperoleh dari besaran nilai PDRB merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor memiliki kontribusi yang besar terhadap totalitas perekonomian, maka bila sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi, maka sektor tersebut otomatis akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi secara total. Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa sektor **pertanian** sangat dominan kontribusinya di Bener Meriah. Selama periode tahun 2009-2011, sektor ini memberikan sumbangan relatif stabil pada level yang cukup tinggi, yakni masih diatas 45 persen. Dengan kata lain, pergerakan ekonomi di Bener Meriah ditentukan oleh geliat sektor pertanian. Oleh karena itu, merujuk Todaro (2000), strategi pembangunan sektor pertanian harus mampu mengubah pola pertanian subsisten ke pola pertanian komersial yang terspesialisasi.

Tabel 2.2.
Peranan Pertumbuhan Sektoral dan Struktur Ekonomi
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2009-2011 (persen)

Sektor (1)	Peranan Pertumbuhan Sektoral			Struktur Ekonomi		
	2009 (2)	2010 (3)	2011** (4)	2009 (5)	2010 (6)	2011** (7)
Primer						
1. Pertanian	1.17	1.59	3.12	49.66	47.22	45.28
2. Pertambangan & Pengalihan	9.74	8.47	7.98	0.71	0.74	0.75
Sekunder						
3. Industri Pengolahan	6.61	6.55	10.47	2.95	2.91	2.89
4. Listrik & Air Minum	29.42	16.21	13.33	0.79	0.92	1.01
5. Bangunan & Konstruksi	8.70	8.21	2.86	17.48	18.24	18.37
Tersier						
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	8.03	8.99	9.92	7.88	8.42	9.08
7. Pengangkutan & Komunikasi	8.37	8.36	6.75	6.25	6.96	7.45
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	10.08	9.47	4.53	2.79	3.05	3.41
9. Jasa-jasa	8.27	8.09	7.03	11.50	11.54	11.77
PDRB	4.54	4.81	5.11	100.00	100.00	100.00

(* Angka Diperbaiki) ,(** Angka Sementara)

Dari Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Bener Meriah adalah 4,54 persen. Dari sembilan sektor yang ada di daerah ini, sektor pertanian yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB Bener Meriah yaitu sebesar 49,66 persen. Sektor ini mampu tumbuh sebesar 1,17 persen. adapun Sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2009 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sektor Listrik dan Air Minum, sebesar 29,42 persen. Walaupun tingkat pertumbuhannya tinggi tetapi peranan bagi distribusi PDRB sektoran sangat kecil yaitu hanya 0,79 persen. Karena kontribusinya yang relatif rendah ini, maka sektor Listrik & Air Minum tidak dapat mendorong tinggi laju pertumbuhan ekonomi Bener Meriah di tahun 2009.

Pada tahun 2010, PDRB Bener Meriah mampu tumbuh 4,81 persen. Pertumbuhan ini juga didukung oleh pertumbuhan sektor Pertanian, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Industri Pengolahan yang terus mengalami peningkatan. Sektor pertanian merupakan penyumbang yang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bener Meriah yaitu sebesar 47,22 persen pada tahun 2010.

Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Bener Meriah sebesar 5,11 persen dimana pertumbuhan ini terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dan didukung oleh hampir semua sektor mengalami peningkatan pertumbuhannya. Ini merupakan keadaan yang baik bagi kelangsungan pembangunan perekonomian Bener Meriah di tahun-tahun berikutnya.

2.2. Perkembangan Ekonomi Sektoral

Secara umum seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2009 sampai dengan 2011 mengalami pertumbuhan positif. Ini menunjukkan adanya peningkatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah. Hampir seluruh sektor meningkat pertumbuhannya dibandingkan tahun sebelumnya dengan rata-rata diatas 6 persen.

Pertumbuhan sektoral Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 2.2 yaitu sebesar 5,11 persen, dimana pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh beberapa sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu sektor Listrik dan Air Minum sebesar 13,33 persen, diikuti oleh sektor Industri Pengolahan 10,47 persen, sektor Perdagangan Hotel dan Restoran 9,92 persen, Jasa-jasa swasta 8,99 persen dan sektor Penggalian 7,98 persen. Sedangkan sektor dengan laju pertumbuhan terendah adalah sektor Pertanian sebesar 3,12 persen, dan sektor Komunikasi 3,57 persen.

Tabel 2.3.
Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Pertanian di Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2009 - 2011 (persen)

Sub Sektor	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Bahan Makanan	9.60	9.21	0.62
2. Tanaman Perkebunan	8.26	6.26	5.39
3. Peternakan	8.25	4.45	0.35
4. Kehutanan	-19.33	-18.23	0.24
5. Perikanan	6.31	2.63	0.02
Sektor Pertanian	1.17	1.59	3.12

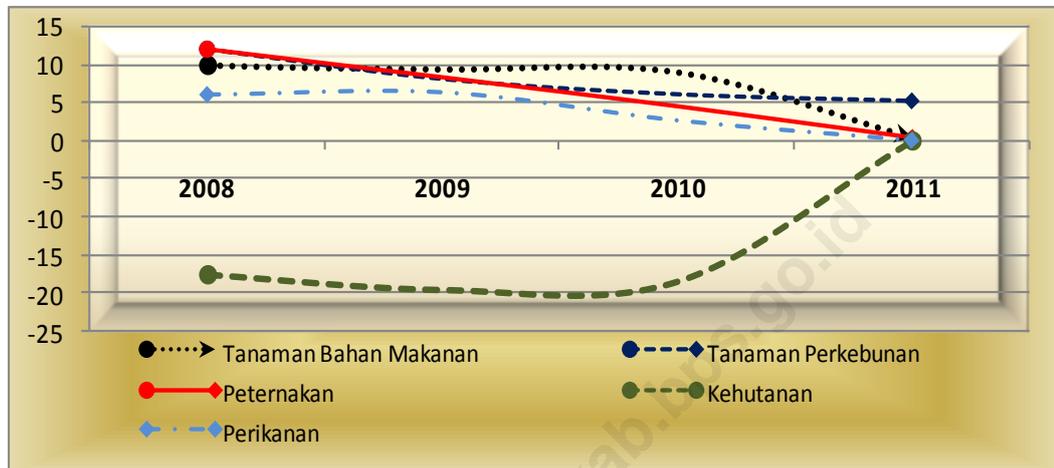
Penyumbang PDRB terbesar Kabupaten Bener Meriah diberikan oleh sektor pertanian. Secara umum, pada tahun 2011 sektor pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 45,28 persen dan tumbuh sebesar 3,12 persen. Posisi sektor pertanian dalam kegiatan ekonomi Bener Meriah tampaknya semakin membaik dimana pada tahun 2010 sempat mengalami kontraksi sebesar 1,53 persen dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan sektor pertanian ini dipengaruhi oleh pertumbuhan masing-masing sub sektornya yang cukup fluktuatif dari tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan tertinggi oleh sub sektor perkebunan sebesar 5,39 persen dan terendah adalah sub sektor perikanan sebesar 0,02 persen.

Secara umum terjadi peningkatan pada keseluruhan sub sektor pertanian tahun 2011 di Kabupaten Bener Meriah. Dengan rincian sebagai berikut: Peningkatan yang terjadi pada sub sektor perkebunan sebesar 5,39 persen dimana sub sektor ini sangat ditunjang oleh perkebunan kopi yang memang merupakan produk andalan dari Kabupaten Bener Meriah. Peningkatan lainnya juga terjadi pada sub sektor tanaman bahan makanan yaitu 0,62 persen, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya sebesar 0,35 persen, dengan ternak yang dominan adalah ternak kerbau, sapi dan kambing. Di Kabupaten Bener Meriah juga terdapat peternakan ayam petelur dan peternakan ayam potong. Peternakan ayam kampung juga tidak kalah pentingnya. Pertumbuhan sektor pertanian juga didukung oleh sub sektor kehutanan sebesar 0,24 persen, dan sub sektor

perikanan sebesar 0,02 persen dimana sebagian besar sub sektor ini didominasi oleh perikanan ikan di air tawar/kolam.

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bener Meriah
Sektor Pertanian Tahun 2008–2011 (persen)



Kemajuan ekonomi Kabupaten Bener Meriah salah satunya dapat ditandai dengan adanya kemajuan pembangunan. Pembangunan berupa sarana maupun prasarana fisik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang didukung oleh situasi daerah yang kondusif dan aman akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah ini, terutama sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan pembangunan seperti sektor Bangunan/Konstruksi, sektor Perdagangan, Hotel dan restoran, sektor Pengangkutan dan komunikasi, sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan serta Jasa-jasa.

Sektor Bangunan/Konstruksi pada tahun 2011 hanya mampu tumbuh sebesar 2,86 persen. Akan tetapi sektor ini sangat memberi andil terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Bener Meriah karena kontribusinya yang cukup besar yaitu 18,37 persen.

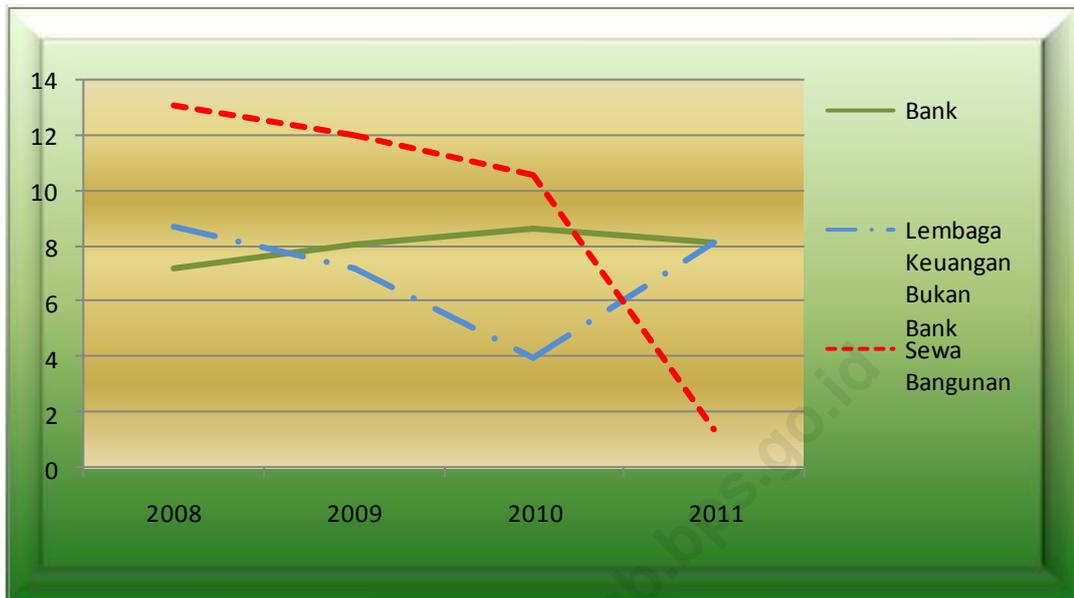
Peningkatan lainnya terjadi pada sektor Industri Pengolahan, dimana pada tahun 2008 sektor ini sempat tumbuh mencapai 8,24 persen, kemudian menurun kembali ditahun 2009 menjadi 6,61 persen, kemudian terus melambat menjadi 6,55 persen di tahun 2010 dan akhirnya pada tahun 2011 ini meningkat signifikan 10,47 persen. Sektor lainnya yang terus meningkat yaitu Perdagangan, Hotel dan Restoran, dimana pada tahun

2009 sektor ini mampu tumbuh hingga 8,03 persen kemudian tahun 2010 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 8,99 persen, dan pada tahun 2011 ini trend peningkatannya terus berlanjut mencapai 9,92 persen. Peningkatan ini terjadi pada sub sektor perdagangan, yaitu sebesar 10,19 persen sedangkan sub sektor Restoran dan Rumah Makan melambat pertumbuhannya menjadi 3,78 persen. Keduanya mulai menampakkan peran yang semakin baik dalam sektor ini, sedangkan untuk sub sektor hotel di Kabupaten Bener Meriah belum ada fasilitas hotel.

Sektor Pengangkutan & Komunikasi memberikan pertumbuhan sebesar 8,36 persen pada tahun 2010 dan melambat pada tahun 2011 menjadi 6,75. Pertumbuhan di sektor ini didukung oleh sub sektor angkutan darat sebesar 6,80 persen dan untuk angkutan udara terus mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 7,81 persen. Hal ini disebabkan sudah normalnya aktifitas angkutan udara pada tahun 2011. Angkutan udara hanya melayani rute penerbangan Rembele-Medan dan sebaliknya. Pada sub sektor komunikasi pertumbuhan sebesar 3,57 persen pada tahun 2011.

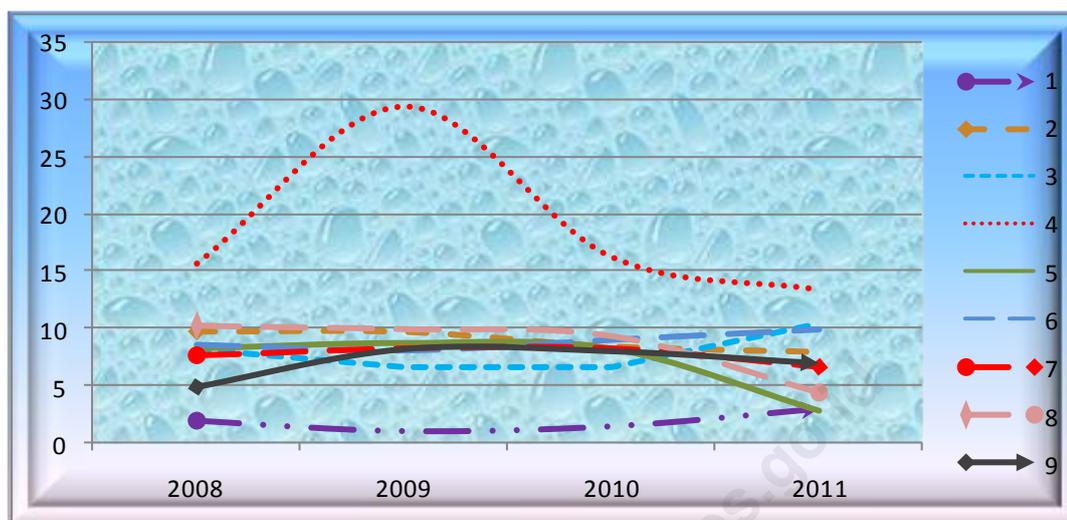
Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 4,53 persen pada tahun 2011. Pertumbuhan sektor ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang pertumbuhannya mencapai 9,47 persen. Sub sektor Bank tumbuh sebesar 8,17 persen dimana angka ini mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya, tahun 2010 yaitu 8,67 persen. Sub sektor Bank merupakan sub sektor yang mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun sebelumnya yang mencapai 8,67 persen, tetapi pada tahun 2011 sub sektor hanya tumbuh sebesar 8,17 persen. Jika dibandingkan dengan sub sektor lainnya, sub sektor bank selalu mengalami peningkatan yang stabil, sehingga diharapkan di periode berikutnya akan memberikan dampak yang lebih baik bagi perekonomian Kabupaten Bener Meriah secara keseluruhan. Pertumbuhan lainnya, Sub sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar 8,17 persen dan sub sektor Sewa Bangunan tumbuh sebesar 1,4 persen. Dukungan yang disumbangkan oleh sektor moneter turut mempercepat pertumbuhan di sektor riil.

Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bener Meriah
Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Tahun 2008–2011 (persen)



Sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 10,47 persen pada tahun 2011 dan pada tahun 2010 sebesar 6,55 persen. Sektor listrik dan Air minum masih mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 13,33 persen pada tahun 2011 walaupun tidak sebesar tahun 2010 yang tumbuh sebesar 16,21 persen. Laju pertumbuhan yang tinggi di sektor ini menyumbangkan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 1,01 persen. Demikian juga dengan sektor Pertambangan & Penggalian yang mampu tumbuh sebesar 7,98 persen pada tahun 2011, namun andil di dalam pembentukan PDRB di sektor ini masih dibawah 1,00 persen, yaitu 0,75 persen.

Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bener Meriah
menurut Sektor Tahun 2008 – 2011 (persen)



Keterangan:

1. Sektor Pertanian
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Sektor Industri Pengolahan
4. Sektor Listrik dan Air Minum
5. Sektor Bangunan/Konstruksi
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9. Sektor Jasa-jasa

2.3. Struktur Ekonomi

Dominasi sektor pertanian yang tinggi membuat Transformasi struktural di Kabupaten Bener Meriah agaknya sulit terealisasi. Pola kegiatan ekonomi di Kabupaten Bener Meriah bisa dikatakan sama sejak tahun 2001 dimana kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor primer.

Meskipun sektor primer memberikan kontribusi yang tinggi, namun dalam perjalanannya dari tahun ke tahun juga terus mengalami penurunan hingga tahun 2011. Pada tahun 2008 sebesar 55,12 persen, turun menjadi 53,41 persen pada tahun 2009 dan tahun 2010 peranan sektor ini menjadi 51,82 persen terhadap PDRB Kabupaten Bener Meriah. Pada tahun 2011 peranan sektor primer kembali turun menjadi 50,88 persen, hal

ini tidak menyebabkan perubahan struktur perekonomian di daerah ini. Struktur perekonomian di Kabupaten Bener Meriah sangat tertumpu pada sektor primer. Hal ini dapat kita lihat dimana sektor primer ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Bener Meriah rata-rata sebesar 50 persen.

Kontribusi terbesar kedua PDRB Kabupaten Bener Meriah disumbangkan oleh kelompok sektor tersier sebesar 33,03 persen di tahun 2008 dan tahun 2009 kontribusi sektor ini naik menjadi 34,21 persen. Kenaikan ini terus terjadi walaupun secara perlahan. Pada tahun 2010 memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu sebesar 35,40 persen, hingga pada tahun 2011 kembali meningkat menjadi 36,28 persen. Ini berarti bahwa peran sektor tersier ini secara perlahan terus meningkat.

Sementara itu sektor sekunder menempati urutan ketiga dalam kurun waktu empat tahun terakhir yang berarti kelompok sektor ini memberikan kontribusi terendah terhadap total PDRB. Pada tahun 2008 kontribusi sektor sekunder mencapai angka 11,85 persen. Sektor ini juga terus mengalami kenaikan walaupun perlahan. Tahun 2009 dan 2010, masing-masing sebesar 12,38 persen dan 12,78 persen. Kenaikan kontribusi sektor sekunder kembali terjadi di tahun 2011 menjadi 12,84 persen.

Tabel 2.4.
Struktur Ekonomi Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2008 – 2011 (persen)

Sektor (1)	Tahun			
	2008*	2009*	2010*	2011**
	(2)	(3)	(4)	(5)
Primer	55,12	53,41	51,82	50,88
1. Pertanian	54,35	52,6	50,98	50,02
2. Pertambangan dan Penggalan	0,77	0,81	0,84	0,86
Sekunder	11,85	12,38	12,78	12,84
3. Industri Pengolahan	3,43	3,5	3,56	3,74
4. Listrik & Air Minum	0,6	0,75	0,83	0,89
5. Bangunan & Konstruksi	7,82	8,13	8,39	8,21
Tersier	33,03	34,21	35,4	36,28
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	9,45	9,76	10,15	10,62
7. Pengangkutan & Komunikasi	4,04	4,19	4,33	4,4
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,65	1,74	1,82	1,81
9. Jasa-jasa	17,89	18,52	19,1	19,45
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

2.4. Peranan Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB

Sektor pertanian sebagai penopang utama mata pencaharian penduduk Kabupaten Bener Meriah, selama tahun 2006 sampai dengan 2011 memiliki peranan yang relatif stabil pada kisaran 61 - 47 persen. Meskipun pada tahun 2011 kontribusinya terus menurun 1,94 persen yaitu dari 54,76 persen pada tahun 2008, menjadi 45,28 persen pada tahun 2011. Namun dalam periode empat tahun terakhir ini peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Bener Meriah selalu lebih tinggi dibandingkan delapan sektor lainnya.

Pada tahun 2011 kontribusi tertinggi di sektor pertanian masih disumbangkan oleh sub sektor perkebunan yang mencapai 23,33 persen. Disusul kemudian oleh sub sektor tanaman bahan makanan 12,57 persen. Sedangkan sub sektor kehutanan menduduki

peringkat ketiga dalam peranannya terhadap PDRB Kabupaten Bener Meriah, yaitu sebesar 7.02 persen.

Adanya berbagai perkembangan dan kemajuan teknologi seharusnya mampu meningkatkan produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi serta mendorong terciptanya kreasi dan inovasi baru dalam mendorong produksi barang dan jasa tidak hanya dari segi kuantitas melainkan juga kualitasnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya peranan sektor jasa-jasa di atas 10 persen. Agaknya kesadaran untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat telah mendorong sub sektor pemerintahan umum untuk meningkatkan kegiatannya, sehingga peranan sub sektor tersebut terhadap PDRB Bener Meriah sudah di atas 10 persen.

Proses pengembangan kota yang selalu mengikuti pembangunan ekonomi telah mempengaruhi struktur perkonomian Kabupaten Bener Meriah dari tahun ke tahun. Semakin lama hal tersebut menuntut perumahan yang lebih baik, pertokoan yang lebih nyaman dan sarana perkantoran yang memadai. Kebutuhan itu meningkatkan peranan sektor bangunan/konstruksi dalam pembentukan PDRB Bener Meriah. Selama tahun 2009, 2010 dan 2011 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 17,48 persen, 18,24 persen, dan 18,37 persen.

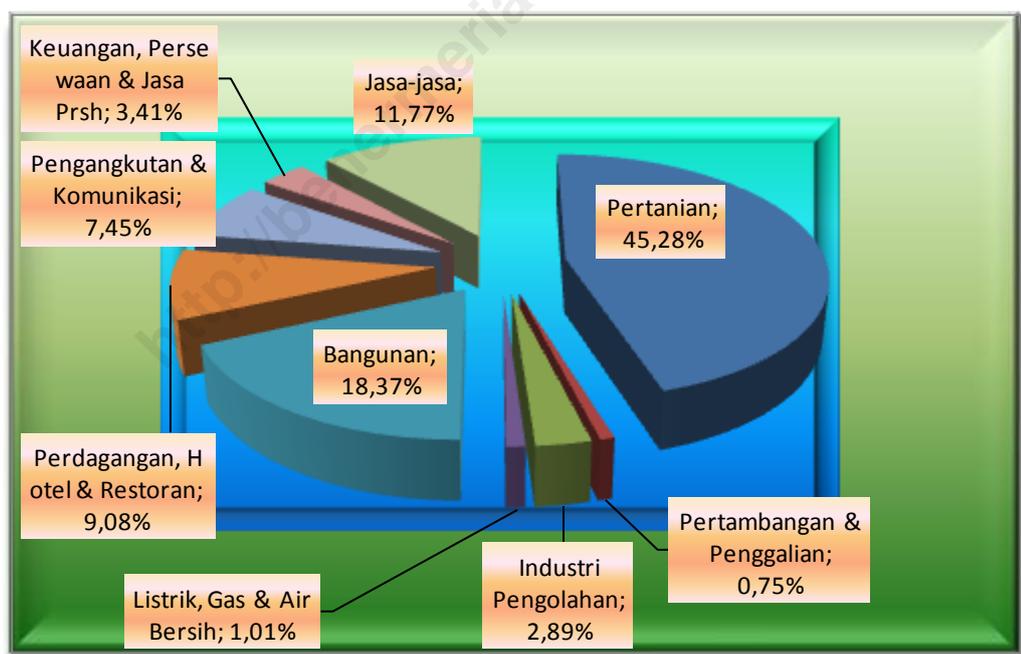
Kemajuan dalam berbagai bidang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi akan mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi dan selanjutnya akan memperluas pasar. Walaupun peranan sektor perdagangan, hotel & restoran terhadap PDRB Bener Meriah tidak besar, tapi peranan sektor tersebut turut mendukung berjalannya perekonomian daerah ini. Pada tahun 2009 kontribusi sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 7,88 persen kemudian pada tahun 2010 sebesar 8,42 persen dan tahun 2011 mencapai 9,08 persen.

Perananan sektor pertanian yang tinggi tidak akan mampu mendongkrak kontribusinya tanpa dukungan dari sektor industri pengolahan karena sektor ini yang mampu memberikan nilai tambah yang lebih tinggi pada produk atau komoditas yang dihasilkan oleh sektor pertanian sehingga memiliki nilai jual yang tinggi pula. Pada tahun 2009 dan 2010 peranan industri pengolahan dalam pembentukan PDRB mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 2,95 persen menjadi 2,91 persen, dan di tahun 2011 kembali mengalami penurunan tipis menjadi 2,89 persen. Tidak demikian halnya dengan

sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor ini mengalami sedikit kenaikan peranannya dari 0,71 persen di tahun 2009, 0,74 persen di tahun 2010 dan naik tipis di tahun 2011 menjadi 0,75 persen.

Untuk sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan yang pada tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan kontribusi yaitu sebesar 2,79 persen dan 3,05 persen, pada tahun ini trend penguatan sektor ini masih berlanjut yang pada tahun 2011 naik kembali menjadi 3,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan di daerah ini mampu berkembang lebih baik dari tahun ke tahun. Hal-hal seperti ini menunjukkan adanya pergeseran peran walaupun dalam persentase yang kecil dari masing-masing sektor terhadap perekonomian Kabupaten Bener Meriah.

Gambar 2.5
Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011



2.5. Perkembangan PDRB dan Pendapatan Regional Per Kapita

Untuk menghitung PDRB perkapita merupakan Nilai Total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Bila ditinjau dari PDRB atas dasar harga berlaku besarnya PDRB Per Kapita terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.5.
PDRB Per Kapita Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 – 2010

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	11.941.051,72	15,73	6.133.387,77	2,90
2009*	13.741.425,08	15,08	6.304.552,26	2,79
2010	14.560.299,89	5,96	6.182.627,06	-1,89
2011**	15.877.465,30	9,05	6.355.940,01	2,80

* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

PDRB per kapita menunjukkan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita Bener Meriah tahun 2008 meningkat sebesar 15,73 persen yaitu sebesar 11,94 juta rupiah. Tahun 2009 pertumbuhan PDRB per kapita Bener Meriah menjadi 15,08 persen menjadi 13,74 juta rupiah. Pada tahun 2010 hingga tahun 201 PDRB per kapita juga mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhannya lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,96 persen pada tahun 2010 dengan nilai 14,56 juta rupiah dan tahun 2011 pertumbuhan PDRB perkapita menjadi 9,05 persen atau senilai dengan 15,88 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena terjadi pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, dan proyeksi penduduk pertengahan tahun 2011 bener meriah yang mencapai 125.076 jiwa, maka untuk mendapatkan PDRB perkapita jumlah penduduk merupakan pembagi dari nilai PDRB.

Bila dihitung dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, PDRB per kapita Bener Meriah tumbuh sebesar 2,90 persen yaitu 6,13 juta rupiah di tahun 2008.

Kemudian kembali meningkat pada tahun 2009 sebesar 6,3 juta rupiah atau 2,79 persen, kemudian pada tahun 2010 menurun 1,89 persen atau 6,18 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2011 kembali meningkat sebesar 2,80 persen atau menjadi 6,35 juta rupiah.

Indikator lain yang dapat memberikan keterangan mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan regional per kapita. Sama halnya dengan PDRB perkapita, pada tahun 2008 berdasarkan harga berlaku terjadi peningkatan pendapatan sebesar 15,73 persen yaitu sebesar 11,31 juta rupiah. Sepanjang periode tahun 2008 hingga 2011, terus terjadi peningkatan pendapatan regional per kapita di Kabupaten Bener Meriah. Pada tahun 2009, pendapatan regional per kapita Kabupaten Bener Meriah mencapai 13,02 juta rupiah atau meningkat hingga 15,08 persen. Pada tahun 2010 pendapatan regional perkapita penduduk bener meriah tumbuh 5,65 persen sehingga menjadi 13,75 juta rupiah, dan pada tahun 2011 pertumbuhannya sebesar 9,37 persen atau senilai dengan 15,04 juta rupiah. Alasan yang sama terjadi pada PDRB per kapita, yaitu pertambahan nilai pendapatan regional per kapita Bener Meriah terkalahkan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk pertengahan tahun 2010 dan 2011 sebagai pembagi PDRB sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan yang dinilai dalam persen.

Tabel 2.6
Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 – 2011

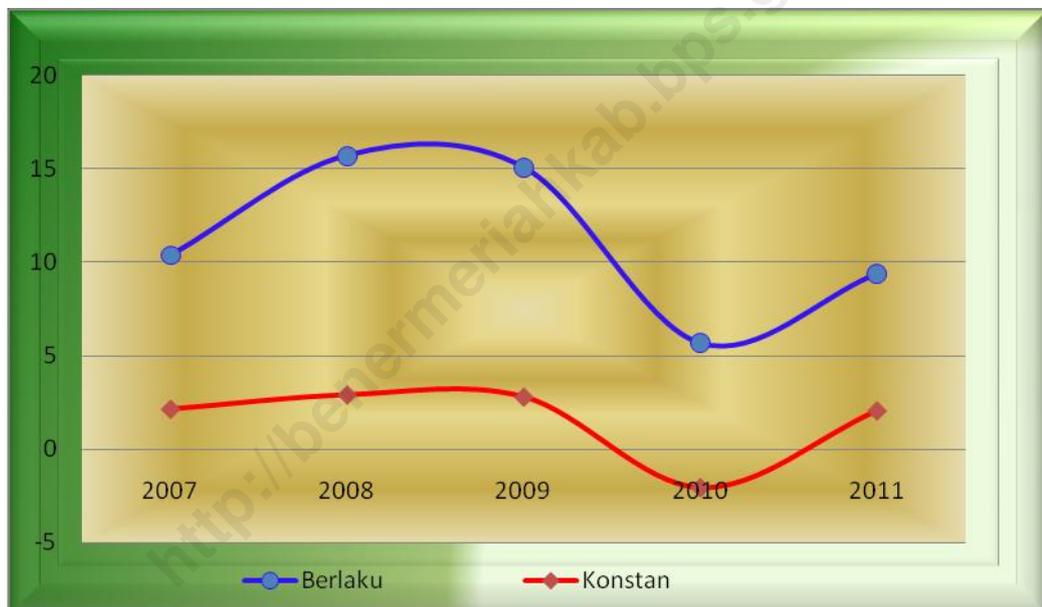
Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	11.314.317,71	15.73	5.804.314,32	2,90
2009*	13.020.197,28	15.08	5.966.295,36	2,79
2010	13.755.405,35	5,65	5.843.624,67	-2.05
2011**	15.044.126,05	9,37	5.963.338,84	2.05

* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

Kemudian bila dihitung berdasarkan harga konstan, pendapatan regional per kapita Kabupaten Bener Meriah juga mengalami kenaikan sebesar 2,90 persen menjadi 5,80 juta rupiah di tahun 2008. Tahun 2009 pendapatan regional per kapita sedikit melambat pertumbuhannya menjadi 2,79 persen atau setara dengan 5,96 juta rupiah pertahun. Pada tahun 2010, pendapatan regional perkapita mengalami penurunan sebesar 2,05 persen atau menjadi 5,84 juta rupiah, dan pada tahun 2011 pendapatan regional perkapita penduduk Kabupaten Bener Meriah kembali positif atau tumbuh sebesar 2,05 persen yang setara dengan 5,96 juta rupiah per tahunnya.

Gambar 2.6
Laju Pertumbuhan Pendapatan Regional Per Kapita
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007–2011 (persen)



2.6. Inflasi/Deflasi

Inflasi dan perekonomian Indonesia sangat saling berkaitan. Apabila tingkat inflasi tinggi, sudah dipastikan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dimana akan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Inflasi/deflasi merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan harga. Fluktuasi harga yang terjadi akan berpengaruh pada daya beli konsumen karena berakibat terhadap ketidakseimbangan dengan pendapatan. Indeks ini dapat juga diturunkan dari PDRB yang disebut sebagai PDRB deflator atau yang

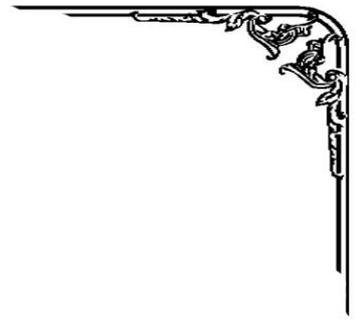
6 dikenal dengan indeks implisit. Indeks ini merupakan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan.

Berbeda dengan indeks harga konstan, indeks implisit menggambarkan perbaikan harga di tingkat produsen. Indeks implisit PDRB yang dihasilkan akan menggambarkan perkembangan perubahan harga. Pertumbuhan dari indeks implisit inilah yang disebut sebagai indikator inflasi indeks harga implisit.

Indikator inflasi indeks harga implisit PDRB pada tahun 2011 adalah sebesar 6,12 persen, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2010 yang menunjukkan angka 8,00 persen. Inflasi tertinggi di tahun 2011 terjadi pada sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 19,45 persen, diikuti oleh sektor Pengangkutan dan komunikasi 11,86 persen, lalu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 9,35 persen. Dan sektor dengan inflasi terendah masih sama dengan tahun 2010 lalu yaitu sektor Industri pengolahan sebesar 0,17 persen, diikuti sektor pertanian 3,71 persen dan terendah ketiga adalah sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 5,36 persen.

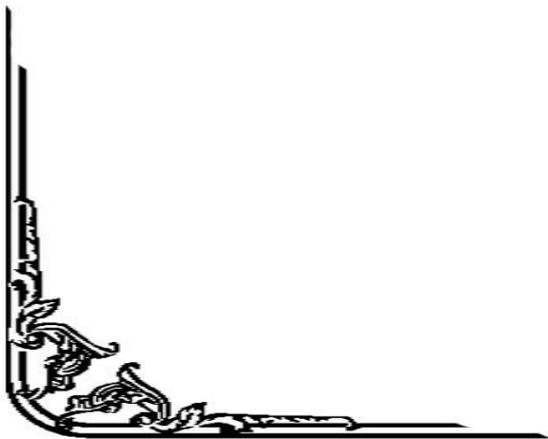
Tabel 2.7
Indikator Inflasi Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Bener Meriah
menurut Sektor Tahun 2007 - 2011 (persen)

<i>Sektor</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009*</i>	<i>2010</i>	<i>2011**</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	2,25	9,82	4,89	5,96	3,71
2. Pertambangan Dan Penggalan	14,84	8,96	4,59	7,99	5,36
3. Industri Pengolahan	8,81	8,68	1,93	4,89	0,17
4. Listrik Dan Air Minum	14,76	13,89	3,2	13,34	8,49
5. Bangunan/Kontruksi	41,54	28,2	42,21	9,17	9,20
6. Perdagangan, Hotel Dan Restoran	8,06	14,42	13,02	11,09	9,35
7. Pengangkutan Dan Komunikasi	27,15	17,62	17,99	16,34	11,86
8. Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	11,49	31,41	33,83	12,8	19,45
9. Jasa-Jasa	4,43	4,42	4,36	5,13	6,24
BENER MERIAH	7,90	12,47	11,95	8,00	6,12



<http://benermeriah.go.id>

LAMPIRAN



A. LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

Uraian sektoral yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing sektor dan sub sektor, cara-cara penghitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, serta sumber datanya.

1. Pertanian

Ruang lingkup sektor pertanian adalah segala perusahaan yang didapat dari alam dan merupakan barang-barang biologis atau hidup dimana hasilnya akan digunakan untuk memenuhi hidup sendiri atau dijual kepada pihak lain, tidak termasuk kegiatan yang tujuannya untuk hobi saja. Kegiatan pertanian pada umumnya berupa cocok tanam, pemeliharaan ternak, penangkapan ikan, penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan serta perburuan binatang liar. Sektor pertanian meliputi 5 sub sektor yaitu: sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.

1.1. Tanaman Bahan Makanan

Sub sektor ini mencakup komoditi bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, umbi-umbian, kacang tanah, kacang kedele, kacang-kacangan lainnya, sayur-sayuran, buah-buahan, padi-padian serta bahan makanan lainnya.

1.2. Tanaman Perkebunan

Sub sektor ini mencakup semua jenis kegiatan tanaman perkebunan yang diusahakan baik oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Komoditi yang dicakup meliputi antara lain cengkeh, jahe, jambu mete, jarak, kakao, karet, kapas, kapok, kayu manis, kelapa, kelapa sawit, kemiri, kina, kopi, lada, pala, panili, serat karung, tebu, tembakau, teh serta tanaman perkebunan lainnya.

1.3. Peternakan dan Hasilnya

Sub sektor ini mencakup semua kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong dan

diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Jenis ternak yang dicakup adalah: sapi, kerbau, kambing, babi, kuda, ayam, itik, telur ayam, telur itik, susu sapi serta hewan peliharaan lainnya.

1.4. Kehutanan

Sub sektor ini mencakup kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran, termasuk juga kegiatan perburuan. Komoditi yang dicakup meliputi: kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, arang, bambu, terpentin, gondorukem, kopal, menjangan, babi hutan, rusa, serta hasil hutan lainnya.

1.5. Perikanan

Sub sektor ini mencakup semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun di air asin. Komoditi hasil perikanan antara lain seperti ikan tuna, ikan karang dan jenis ikan laut lainnya; ikan mas dan jenis ikan darat lainnya; ikan bandeng dan jenis ikan air payau lainnya; udang dan binatang berkulit keras lainnya; cumi-cumi dan binatang lunak lainnya; rumput laut serta tumbuhan laut lainnya.

1.6. Jasa Pertanian

Jasa Pertanian merupakan jasa-jasa khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan ekonomi pertanian berdasarkan suatu pungutan atau kontrak tertentu. Termasuk dalam jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian dengan operatornya dengan syarat pengelolaan dan resiko usaha tersebut dilakukan secara terpisah. Dalam penghitungan nilai tambah sektor pertanian, secara konsep nilai tambah jasa pertanian ini terdistribusi pada masing-masing sub sektor (misalnya jasa dokter hewan pada sub sektor peternakan, jasa memetik kopi pada sub sektor perkebunan). Akan tetapi karena sampai saat ini belum didapat informasi yang lengkap tentang jasa pertanian, maka untuk alasan praktisnya nilai tersebut dianggap terwakili dalam besarnya persentase *mark-up* untuk tiap-tiap sub sektor pertanian.

1.7. Metode Penghitungan Output dan Nilai Tambah

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah sektor pertanian adalah melalui pendekatan dari sudut produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan tersedianya data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian. Secara umum, nilai output setiap komoditi diperoleh dari hasil perkalian antara produksi yang dihasilkan dengan harga produsen komoditi bersangkutan. Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap (*mark-up*) yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Total output suatu sub sektor merupakan penjumlahan dari nilai output utama dan ikutan dari seluruh komoditi ditambah dengan nilai pelengkapannya. Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu sub sektor diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap komoditi. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga produsen terhadap seluruh biaya antara, yang dalam prakteknya biasa dihitung melalui perkalian antara rasio NTB terhadap output komoditi tertentu. Untuk keperluan penyajian data NTB atas dasar harga konstan 2000 ($2000=100$), digunakan metode revaluasi, yaitu metode dimana seluruh produksi dan biaya-biaya antara dinilai berdasarkan harga tahun dasar 2000. Khusus untuk sub sektor peternakan, penghitungan produksinya tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi diperoleh melalui suatu rumus persamaan yang menggunakan tiga peubah, yakni: banyaknya ternak yang dipotong ditambah selisih populasi ternak dan selisih antara ekspor dan impor ternak.

2. Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam sektor pertambangan dan penggalian dikelompokkan dalam tiga sub sektor, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan tanpa migas dan penggalian. Di Kabupaten Bener Meriah tidak ada kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (migas) dan pertambangan bukan migas, yang ada yaitu berupa penggalian seperti batu, pasir, tanah dan lain sebagainya.

2.1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Pertambangan migas meliputi kegiatan pencarian kandungan minyak dan gas bumi, penyiapan pengeboran, penambangan, penguapan, pemisahan serta penampungan untuk dapat dijual atau dipasarkan. Komoditi yang dihasilkan adalah minyak bumi, kondensat dan gas bumi.

Metode penghitungan yang digunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan output tersebut dengan rasio NTB terhadap output pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2000. Melalui perkalian antara output dengan rasio NTB terhadap output tahun 2000 diperoleh NTB atas dasar harga konstan 2000.

2.2. Penggalan

Sub sektor ini mencakup penggalan dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalan selain tersebut diatas. Termasuk dalam sub sektor penggalan adalah komoditi garam kasar.

3. Industri Pengolahan

Industri pengolahan dibedakan atas dua kelompok besar yaitu pertama industri pengolahan minyak dan gas bumi (migas), kedua yaitu industri pengolahan tanpa migas.

3.1. Industri Pengolahan Migas Pengilangan Minyak Bumi

Pengilangan minyak bumi meliputi produk LPG yang dihasilkan oleh pengilangan gas alam. Pendekatan penghitungan output untuk sub sektor ini menggunakan

pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedang atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari output atas dasar harga berlaku dikalikan dengan rasio NTB untuk masing-masing tahun, sedangkan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikalikan dengan rasio NTB pada tahun dasar.

3.1.1. Gas Alam Cair

Pengilangan gas alam cair di Indonesia terdapat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kalimantan Timur. Pendekatan estimasi output menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah perkalian antara produksi dengan harganya untuk masing-masing tahun, sedang atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasarnya.

NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari output atas dasar harga berlaku dikalikan dengan rasio NTB untuk masing-masing tahun. Sedang untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikalikan dengan rasio NTB pada tahun dasar.

3.2. Industri Tanpa Migas

Sejak tahun 1993 Industri Pengolahan Tanpa Migas disajikan menurut dua digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLU) yaitu industri makanan, minuman dan tembakau (31); Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (32); Industri kayu, bambu dan rotan (33); Industri kertas dan barang dari kertas (34); Industri kimia dan barang-barang dari kimia dan karet (35); Industri barang galian bukan logam (36); Industri logam dasar (37); Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya (38); dan Industri pengolahan lainnya (39).

3.2.1. Industri Besar dan Sedang

Metode penghitungannya menggunakan pendekatan produksi, yaitu output dihitung lebih dahulu, kemudian setelah dikurangi dengan biaya antara diperoleh NTB. Pada prinsipnya metode estimasi yang digunakan, baik pada seri lama maupun pada seri baru tidak berbeda yaitu menggunakan cara inflasi untuk menghitung atas dasar harga berlaku dan cara ekstrapolasi untuk menghitung atas dasar harga konstan.

Baik output maupun nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari survei tahunan Industri Besar Sedang (IBS).

3.2.2. Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga

Pada prinsipnya cakupan dan definisi kegiatan Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga (IKKR) sama dengan cakupan dan definisi kegiatan Industri Besar Sedang tanpa Migas. Perbedaannya terletak pada jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan industri tersebut. Suatu perusahaan dikatakan sebagai Industri Kecil jika tenaga kerjanya berjumlah antara 5 sampai 19 orang. Sedangkan Industri Kerajinan Rumahtangga jika tenaga kerjanya kurang dari 5 orang.

Dengan adanya pergeseran tahun dasar 1993 ke 2000, serta penyempurnaan yang berkaitan dengan kelengkapan data pendukung, maka metode penghitungan output dan NTB sub sektor ini diperbaiki dengan menggunakan pendekatan hasil SUSI (Survei Usaha Terintegrasi).

4. Listrik dan Air Minum

4.1. Listrik

Kegiatan ini mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan Non-PLN seperti pembangkitan listrik oleh Perusahaan Pemerintah Daerah dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan), dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau yang diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi, dan listrik yang dicuri. Metode penghitungan pada sektor ini yaitu dengan menggunakan pendekatan produksi.

4.2. Air Minum

Kegiatan sub sektor air minum/air bersih mencakup proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum, serta pendistribusian dan penyalurannya secara langsung melalui pipa dan alat lain ke rumahtangga, instansi pemerintah maupun swasta. Metode penghitungan yang digunakan yaitu dengan pendekatan produksi.

5. Bangunan

Kegiatan sektor bangunan terdiri dari bermacam-macam kegiatan meliputi pembuatan, pembangunan, pemasangan dan perbaikan (berat maupun ringan) semua jenis konstruksi yang keseluruhan kegiatan sesuai dengan rincian menurut KLUI.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan NTB sektor bangunan adalah melalui pendekatan arus barang (*commodity flows*). Penggunaan metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa besarnya output pada sektor bangunan sejalan dengan besarnya input komoditi yang dipergunakan untuk bangunan. Metode estimasi untuk memperoleh output dan NTB sektor bangunan menggunakan cara ekstrapolasi yang mana output dan nilai tambah bruto dengan harga konstan harus diperoleh dahulu sebelum memperoleh output dan NTB harga berlaku.

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

6.1. Perdagangan

Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas, untuk tujuan penyaluran/pendistribusian tanpa mengubah sifat barang tersebut.

Sub sektor perdagangan dalam perhitungannya dikelompokkan ke dalam dua jenis kegiatan yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar meliputi kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan dan

lembaga yang tidak mencari untung. Sedangkan perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumahtangga tanpa merubah sifat, baik barang baru atau barang bekas.

Metode yang digunakan yaitu metode arus barang. Output atau margin perdagangan merupakan selisih antara nilai jual dan nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi dengan biaya angkut barang dagangan yang dikeluarkan oleh pedagang. Dengan cara metode arus barang, output dihitung berdasarkan margin perdagangan yang timbul akibat memperdagangkan barang-barang dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri serta barang-barang yang berasal dari impor. NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara total output dengan rasio NTB. Kemudian untuk memperoleh total NTB sub sektor perdagangan adalah dengan menjumlahkan NTB tersebut dengan pajak penjualan dan bea masuk barang impor.

6.2. Hotel

Sub sektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi disini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap dimana kegiatan-kegiatan tersebut berada dalam satu manajemen dengan penginapan. Alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB sub sektor hotel diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar dan indikator harganya rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB nya. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode ekstrapolasi.

6.3. Restoran

Kegiatan sub sektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya di konsumsi di tempat penjualan. Kegiatan yang termasuk dalam sub sektor ini seperti rumah makan, warung nasi, warung kopi, catering dan kantin.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung NTB sub sektor restoran yaitu pendekatan pengeluaran konsumsi makanan dan minuman jadi di luar rumah.

7. Pengangkutan dan Komunikasi

7.1. Pengangkutan

Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor ini terdiri atas Angkutan Jalan Raya; Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; Angkutan Laut; Angkutan Udara; dan Jasa Penunjang Angkutan. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lainya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan dan pergudangan.

7.1.1. Angkutan Jalan Raya

Meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga untuk masing-masing jenis angkutan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

7.1.2. Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu satuan usaha, dimana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Pada dasarnya metode estimasi NTB angkutan laut seri tahun dasar 2000 sama dengan seri tahun dasar 1993. Perbedaan kedua seri tersebut terletak dalam penggunaan rasio NTB. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan dihitung dengan metode ekstrapolasi. Sedangkan NTB diperoleh dengan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

7.1.3. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal/angkutan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan mobil yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga dari penyeberangan. Untuk output atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode ekstrapolasi. Sedangkan NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

7.1.4. Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah kilometer (km) penumpang dan kilometer (km) barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku angkutan udara diperoleh dari perusahaan penerbangan. Sedangkan nilai tambah bruto diperoleh dengan mengalikan rasio NTB

dengan outputnya. Output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode ekstrapolasi.

Mulai tahun 2006 Kabupaten Bener Meriah mulai kembali menghitung NTB untuk sub sektor angkutan udara karena kembali aktif kegiatan angkutan udara di daerah ini

7.1.5. Jasa Penunjang Angkutan

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu meliputi jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal dan parkir), bongkar muat laut dan darat, keagenan penumpang, ekspedisi laut, jalan tol dan jasa penunjang lainnya (pengerukan dan pengujian kelayakan angkutan laut).

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output dan NTB atas dasar harga berlaku dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya monopoli diperoleh dari pengolahan laporan keuangan BUMN yang terkait. Kegiatan lainnya diperhitungkan dengan mengalikan indikator produksi dan harga. Rasio-rasio yang digunakan adalah rasio NTB, rasio *mark-up* dan rasio lainnya yang sesuai. Output dan NTB jasa penunjang angkutan di estimasi dengan pendekatan produksi, yaitu dengan menggunakan jumlah perusahaan sebagai indikator produksi, dan rata-rata pendapatan per perusahaan sebagai indikator harganya. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan metode ekstrapolasi.

7.2. Komunikasi

Sub sektor ini terdiri dari kegiatan Pos dan Giro, Telekomunikasi, dan Jasa Penunjang Komunikasi. Pos dan Giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan paket pos yang diusahakan oleh Perum Pos dan Giro. Kegiatan telekomunikasi meliputi pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon dan teleks yang diusahakan oleh perusahaan seperti PT Telkom dan PT Indosat. Jasa Penunjang Komunikasi meliputi kegiatan lainnya yang menunjang komunikasi seperti warung telekomunikasi (wartel), radio panggil (pager) dan telepon seluler (ponsel).

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku berupa pendapatan Pos dan Giro serta Telekomunikasi diperoleh dari

laporan keuangan. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari laporan keuangan berupa penjumlahan upah dan gaji, penyusutan, laba/rugi, dan komponen-komponen lainnya dari NTB. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode ekstrapolasi.

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

8.1. Bank

Kegiatan yang dicakup adalah kegiatan yang memberikan jasa keuangan pada pihak lain seperti: menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang, mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga dan sebagainya.

Output dari usaha perbankan adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, biaya pengiriman wesel dan sebagainya. Dalam output bank dimasukkan pula imputasi jasa bank yang besarnya sama dengan selisih antara bunga yang diterima dengan bunga yang dibayarkan.

8.2. Lembaga Keuangan bukan Bank (Usaha Jasa Asuransi)

Asuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan atas barang atau orang tersebut (termasuk tunjangan hari tua). Pada pihak ditanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau mengakibatkan terjadinya kematian tertanggung. Jasa asuransi ini dapat dibedakan menjadi asuransi jiwa, asuransi sosial, serta asuransi kerugian.

Asuransi Jiwa adalah usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko kematian, kecelakaan atau sakit, termasuk juga jaminan hari tua/masa depan pihak tertanggung. Nilai pertanggungan ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian.

Asuransi Kerugian adalah usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan atau kerusakan harta milik/benda termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/harta milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian.

Asuransi Sosial adalah usaha perasuransian yang mencakup usaha asuransi jiwa (kerugian) yang dibentuk pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh/segolongan masyarakat untuk tujuan sosial. Pihak asuransi ini akan menerima/menampung sejumlah iuran/sumbangan wajib dari masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan umum, seperti: jasa angkutan, jasa kesehatan, jasa/pelayanan terhadap pemilik kendaraan bermotor dan pelayanan hari tua.

Output dari kegiatan asuransi merupakan rekapitulasi dari output asuransi jiwa, asuransi bukan jiwa (asuransi sosial, reasuransi kerugian serta broker asuransi).

Biaya antara yang dikeluarkan dalam kegiatan asuransi berupa biaya umum (seperti pembelian alat tulis kantor, BBM, rekening listrik dan sebagainya), biaya pemeliharaan, sewa gedung dan biaya administrasi.

NTB atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan selisih antara output dan biaya antara yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara sebagai berikut: untuk asuransi jiwa menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya adalah jumlah pemegang polis; untuk asuransi sosial menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya adalah jumlah peserta; untuk asuransi kerugian menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah indeks harga perdagangan besar (IHPB) umum.

8.2.1. Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat peserta pensiun dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Manfaat pensiun terdiri dari manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun cacat dan manfaat pensiun ditunda. Jenis dana pensiun

dibedakan menjadi dua yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Output dan NTB atas dasar harga berlaku dari kegiatan Dana Pensiun diperoleh dari hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan estimasi output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan cara deflasi/ekstrapolasi dan sebagai deflatornya/ekstrapolatornya adalah IHK umum atau jumlah peserta.

8.2.2. Pegadaian

Mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang bersifat monopoli dan dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang, yang tugasnya antara lain membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat.

Kegiatan utamanya adalah memberikan pinjaman uang kepada segolongan masyarakat dengan menerima jaminan barang bergerak. Besarnya pinjaman sesuai dengan nilai barang jaminan yang diserahkan pihak peminjam tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya.

Output dan NTB atas dasar harga berlaku dari kegiatan pegadaian diperoleh dari hasil pengolahan laporan keuangan Perum Pegadaian. Outputnya terutama terdiri dari sewa modal, bunga deposito dan lain-lain (sewa rumah). NTB diperoleh dengan mengurangi output dengan biaya antara. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah jumlah nasabah.

8.2.3. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang bergerak di sektor keuangan dengan melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan ini mencakup kegiatan sewa guna usaha, modal ventura, anjak utang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

Output dan struktur input atas dasar harga berlaku lembaga pembiayaan ini diperoleh dari Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan Departemen Keuangan.

Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah jumlah perusahaan.

8.3. Sewa Bangunan

Sub sektor ini meliputi usaha persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan serta usaha persewaan tanah persil.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumahtangga perkapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per meter persegi (m^2). NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

8.4. Jasa Perusahaan

8.4.1. Jasa Hukum (Advokat/Pengacara, Notaris)

Yang dimaksud dengan advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Sedangkan Notaris adalah orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Departemen Kehakiman untuk mensahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akte dan sebagainya.

8.4.2. Jasa Akuntansi dan Pembukuan

Jasa akuntansi dan pembukuan adalah usaha jasa pengurusan tata buku dan pemeriksaan pembukuan termasuk juga jasa pengolahan data dan tabulasi yang merupakan bagian dari jasa akuntansi dan pembukuan.

8.4.3. Jasa Pengolahan dan Penyajian Data

Jasa pengolahan dan penyajian data adalah usaha jasa pengolahan dan penyajian data yang bersifat umum baik secara elektronik komputer maupun manual atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk didalamnya adalah jasa memprogram komputer dan sebagainya yang ada hubungannya dengan kegiatan komputer.

8.4.4. Jasa Bangunan, Arsitek dan Teknik

Jasa bangunan, arsitek dan teknik adalah usaha jasa konsultasi bangunan, jasa survei geologi, penyelidikan tambang/pencarian komoditi pertambangan dan jasa penyelidikan serta sejenisnya.

8.4.5. Jasa Periklanan dan Riset Pemasaran

Jasa periklanan dan riset pemasaran adalah suatu kegiatan usaha yang memberikan pelayanan kepada pihak lain dalam bentuk pembuatan dan pemasangan iklan, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, membujuk dan mengingatkan kepada konsumen tentang produk dari suatu perusahaan/usaha serta dalam penyampaiannya dapat melalui berbagai media massa.

8.4.6. Jasa Persewaan Mesin dan Peralatan

Jasa persewaan mesin dan peralatan adalah usaha persewaan mesin dan peralatannya untuk keperluan pertanian, pertambangan ladang minyak, industri pengolahan, konstruksi dan mesin-mesin keperluan kantor.

Output jasa perusahaan diperoleh dari perkalian antara indikator produksi (jumlah perusahaan atau tenaga kerja) dengan indikator harga (rata-rata output perusahaan atau per tenaga kerja).

9. Jasa-Jasa

9.1. Pemerintahan Umum dan Pertahanan

Jasa pemerintahan pada prinsipnya terbagi dua yakni pertama pelayanan dari pemerintahan departemen dan pertahanan, kedua pelayanan yang diberikan oleh badan-badan di bawah departemen tersebut. Pelayanan kedua ini disebut jasa pemerintahan lainnya.

9.1.1. Administrasi, Pemerintahan dan Pertahanan

Sektor pemerintahan umum dan pertahanan mencakup semua departemen dan non departemen, badan/lembaga tinggi negara, kantor-kantor dan badan-badan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan pertahanan.

Belanja pegawai guru pemerintah yang memegang tata usaha dikategorikan sebagai administrasi pemerintahan, sedangkan belanja pegawai guru pemerintah yang tugasnya mengajar dikategorikan sebagai jasa pendidikan. Begitu juga dokter pemerintah yang tidak melayani masyarakat dikelompokkan sebagai administrasi pemerintahan sedangkan dokter pemerintah yang melayani masyarakat dikelompokkan sebagai jasa kesehatan.

Kegiatan-kegiatan ini meliputi semua tingkat pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota dan desa termasuk angkatan bersenjata.

9.1.2. Jasa Pemerintah Lainnya

Jasa pemerintah lainnya meliputi kegiatan yang bersifat jasa seperti sekolah-sekolah pemerintah, universitas pemerintah, rumah sakit pemerintah, bimbingan masyarakat terasing, museum, perpustakaan, tempat-tempat rekreasi yang dibiayai dari keuangan pemerintah, dimana pemerintah memungut pembayaran yang pada umumnya tidak mencapai besarnya biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Unit-unit usaha semacam ini menyediakan pelayanan jasa untuk masyarakat.

Aparat pemerintah yang melayani penyuluhan Keluarga Berencana (KB) atau memberi penyuluhan kepada masyarakat terasing dikategorikan sebagai jasa

kemasyarakatan lainnya. Sedangkan pegawai pemerintah yang melakukan penjualan karcis masuk taman hiburan, museum atau melayani masyarakat di perpustakaan dikategorikan sebagai jasa hiburan dan kebudayaan.

Belanja pegawai dari sektor ini terdiri dari gaji pokok, honorarium dan tunjangan lainnya. Belanja pegawai yang dipisahkan dari belanja pembangunan ditransfer ke belanja rutin, seperti pembayaran honor pegawai negeri yang turut dalam kegiatan proyek.

Belanja pegawai jasa pemerintahan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, baik rutin maupun pembangunan adalah untuk guru-guru sekolah negeri, pekerja rumah sakit pemerintah, pekerja bimbingan masyarakat terasing, pekerja perpustakaan dan tempat-tempat rekreasi serta museum pemerintah.

Penyusutan barang modal untuk sektor pemerintahan umum datanya belum tersedia, sehingga nilai penyusutan diadakan estimasi berdasarkan rasio terhadap belanja pegawai.

Struktur biaya dari sektor ini tidak memuat unsur surplus usaha, sedangkan pemerintah tidak melakukan pembayaran pajak tak langsung. Untuk memperoleh nilai tambah bruto diperkirakan dari penjumlahan belanja pegawai serta perkiraan penyusutan. Data untuk estimasi NTB sektor pemerintahan umum didasarkan pada realisasi pengeluaran pemerintah.

Belanja pegawai jasa pemerintahan lainnya yang ditransfer dari pemerintah pusat dan daerah diperoleh dari realisasi anggaran belanja pembangunan menurut sektor dan sub sektor. Sedangkan belanja pegawai jasa pemerintahan lainnya untuk pemerintah daerah diperoleh dari laporan belanja pegawai menurut jenis pengeluaran.

Disamping belanja pegawai diatas penyusutan juga termasuk dalam penghitungan NTB jasa pemerintahan lainnya. Dimana nilai penyusutan diperkirakan sekitar 5 persen dari nilai belanja pegawai. Perkiraan NTB sektor pemerintahan umum dan jasa lainnya atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri menurut golongan kepangkatan.

9.2. Swasta

9.2.1. Jasa Sosial Kemasyarakatan

Meliputi jasa pendidikan, kesehatan, riset/penelitian, palang merah, panti asuhan, panti wreda, yayasan pemeliharaan anak cacat (YPAC), rumah ibadah dan sejenisnya, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Output jasa sosial dan kemasyarakatan diperoleh dari hasil perkalian antara masing-masing indikator produksi seperti jumlah murid menurut jenjang pendidikan, jumlah tempat tidur rumah sakit, jumlah dokter, jumlah anak yang diasuh, jumlah orang lanjut usia yang dirawat, jumlah rumah ibadah, jumlah anak cacat yang dirawat dengan rata-rata output per masing-masing indikator.

9.2.2. Jasa Hiburan dan Rekreasi

Meliputi kegiatan produksi dan distribusi film komersial dan film dokumenter untuk kepentingan pemerintah serta reproduksi film video, jasa bioskop dan panggung hiburan, studio radio, perpustakaan, museum, kebun binatang, gedung olahraga, kolam renang, klab malam, taman hiburan, lapangan golf, lapangan tenis, bilyar, klub Galatama, artis film, artis panggung, karaoke, video klip, studio televisi dan stasiun pemancar radio yang dikelola oleh swasta.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga.

Output kegiatan produksi film diperoleh dari perkalian antara jumlah film yang diproduksi dengan rata-rata output per film. Output kegiatan distribusi film diperoleh dari perkalian antara rasio biaya sewa film dengan output bioskop, sedangkan output bioskop diperoleh dari perkalian antara jumlah penonton dengan rata-rata output per penonton. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. Dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output.

Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK hiburan dan rekreasi atau indeks indikator produksi yang sesuai.

9.2.3. Jasa Perorangan dan Rumahtangga

Meliputi segala jenis kegiatan jasa yang pada umumnya melayani perorangan dan rumahtangga, yang terdiri dari:

- a) Jasa perbengkelan/reparsi kendaraan bermotor, mencakup perbaikan kecil dari kendaraan roda empat, roda tiga dan dua, seperti mobil pribadi, mobil umum, sepeda motor dan sebagainya.
- b) Jasa perbengkelan/reparsi lainnya seperti perbaikan/reparsi jam, televisi, radio, lemari es, mesin jahit, sepeda dan barang-barang rumahtangga lainnya.
- c) Jasa pembantu rumahtangga, mencakup koki, tukang kebun, penjaga malam, pengasuh bayi dan anak dan sejenisnya.
- d) Jasa perorangan lainnya, mencakup tukang binatu, tukang cukur, tukang jahit, tukang semir sepatu dan sejenisnya.

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perbengkelan serta jasa perorangan dan rumahtangga diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output jasa pembantu rumahtangga, pengasuh bayi dan sejenisnya diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk pembantu rumahtangga dengan jumlah penduduk pertengahan tahun untuk jasa perorangan yang belum dicakup.

NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output, rasio NTB diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR). Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi.

B. DAFTAR ISTILAH PENTING

Aset (Harta)

Pemilikan atas berbagai macam harta baik berwujud maupun tidak berwujud (*tangible* dan *intangible*) yang dimiliki oleh perorangan, perusahaan atau pemerintah. Secara praktis biasanya dinilai dalam bentuk moneter.

Biaya Antara

Input yang dipergunakan habis dalam proses produksi dan terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa baik yang dibeli dari pihak lain ataupun yang diproduksi sendiri.

Bunga Neto

Selisih antara bunga diterima dan bunga yang dibayar atas pinjaman (finansial) yang diberikan.

Ekspor Barang dan Jasa

Meliputi seluruh transfer dan penjualan barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lainnya dilakukan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam prakteknya, ekspor terdiri dari barang dagangan dan barang lainnya yang keluar melalui daerah batas pabean atau wilayah domestik suatu negara, termasuk pembelian langsung di negara tersebut oleh perwakilan negara asing dan orang-orang non residen. Karena ekspor barang dagangan suatu negara dinilai atas dasar fob, maka nilai ekspor tidak termasuk pengapalan dan asuransi sampai pada negara tujuan.

Faktor Produksi

Mencakup faktor-faktor yang terlibat langsung dalam suatu proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian.

Faktor Pendapatan dari Luar

Merupakan pendapatan/kompensasi yang diterima oleh faktor produksi, atas keterlibatannya dalam suatu proses produksi di luar batas wilayah domestik.

Harga Berlaku

Penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi, pada harga tahun sedang berjalan.

Harga Konstan

Penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan atau yang dikonsumsi, pada harga tetap di satu tahun dasar.

Pajak Tidak Langsung Neto

Pajak Tidak Langsung dikurangi subsidi.

Impor Barang dan Jasa

Meliputi seluruh transfer dan pembelian barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lainnya yang dilakukan baik dalam wilayah domestik maupun di luar negeri. Pada prakteknya, impor terdiri dari barang dagangan dan barang lainnya yang melewati batas pabean atau wilayah domestik suatu negara, termasuk pembelian langsung oleh pemerintah, penduduk dan perwakilan negara tersebut di luar negeri. Karena impor barang-barang dagangan dinilai dengan cif, maka nilai barang termasuk biaya pengangkutan dan asuransi.

Imputasi Jasa

Merupakan perkiraan atas nilai output jasa yang dihasilkan, sebagai contoh imputasi jasa bank, jasa asuransi, jasa dana pensiun dan sebagainya.

Investasi

Dana yang disisihkan untuk ditanamkan sebagai modal dalam usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan harapan modal tersebut akan kembali dalam beberapa tahun.

Kapital

Faktor produksi yang diciptakan oleh keahlian manusia dari sumber alam yang tersedia dan digunakan untuk menciptakan pendapatan seperti: mesin, peralatan, pabrik, dan sebagainya (barang modal).

Margin Perdagangan dan Biaya Transport

Merupakan selisih nilai transaksi pada tingkat harga pembeli dengan tingkat harga produsen. Selisih ini mencakup keuntungan pedagang, baik pedagang besar maupun pedagang eceran dan biaya transport yang timbul dalam menyalurkan barang dari produsen kepada pembeli.

Input Primer

Disebut juga nilai tambah bruto, terdiri dari balas jasa tenaga kerja, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Output Domestik

Nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi tanpa membedakan pelaku produksinya di wilayah domestik tertentu.

Pelengkap (*Mark-up*)

Merupakan besaran persentase tertentu yang ditambahkan terhadap suatu bilangan estimasi yang fungsinya untuk melengkapi data yang tidak lengkap.

Penyusutan

Yang dimaksudkan adalah penyusutan barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi.

Pembentukan Modal Tetap

Meliputi pembuatan dan pembelian barang modal baru baik dari dalam negeri maupun impor, termasuk barang modal bekas dari luar negeri. Pembentukan modal tetap yang dicakup hanyalah yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi di dalam negeri (domestik).

Permintaan Antara

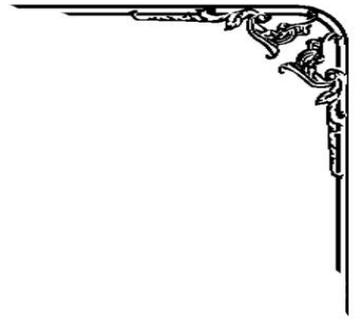
Merupakan permintaan barang dan jasa untuk memenuhi proses produksi.

Permintaan Akhir

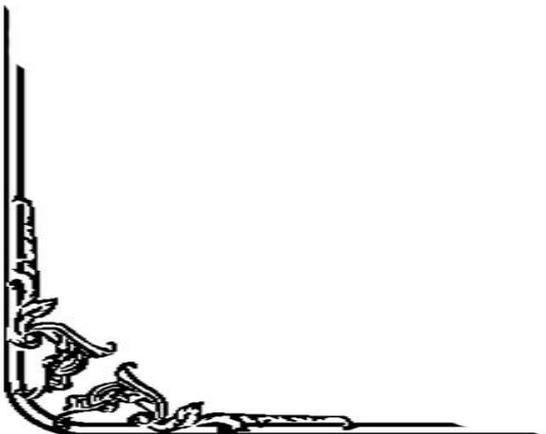
Merupakan permintaan barang dan jasa untuk memenuhi konsumsi akhir, pembentukan modal dan ekspor.

Tahun Dasar

Adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.



TABEL-TABEL



**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bener Meriah
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2009 - 2011 (Juta Rupiah)**

LAPANGAN USAHA	2000	2009*)	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	341.969,96	781.025,27	840.701,26	899.140,12
1.1. Tanaman Bahan Makanan	55.591,86	197.428,42	227.346,61	249.620,03
1.2. Tanaman Perkebunan	123.265,36	384.724,31	431.572,48	463.224,52
1.3. Peternakan	12.619,01	37.745,28	41.824,72	45.205,43
1.4. Kehutanan	149.958,44	159.673,60	138.374,82	139.373,34
1.5. Perikanan	535,28	1.453,66	1.582,63	1.716,80
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	3.390,43	11.236,47	13.161,58	14.973,47
2.1. Pertambangan Minyak dan Gas	-	-	-	-
2.2. Penggalian dan Penggaraman	3.390,43	11.236,47	13.161,58	14.973,47
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	16.335,47	46.372,50	51.824,59	57.344,05
3.1. Industri Migas	-	-	-	-
3.2. Industri tanpa Migas	16.335,47	46.372,50	51.824,59	57.344,05
4. LISTRIK DAN AIR MINUM	2.343,94	12.406,30	16.340,98	20.091,77
4.1. Listrik	2.343,94	12.031,62	15.924,67	19.567,06
4.2. Air Minum	-	374,68	416,31	524,71
5. BANGUNAN/KONTRUKSI	32.852,32	274.927,33	324.762,93	364.762,62
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	39.788,29	123.870,12	149.969,48	180.261,54
6.1. Perdagangan	37.906,45	117.447,36	142.487,31	171.207,69
6.2. Hotel	-	-	-	-
6.3. Restoran/Rumah makan	1.881,84	6.422,76	7.482,17	9.053,85
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	17.891,47	98.228,46	123.826,34	147.852,36
7.1. Pengangkutan Jalan Raya (Darat)	17.668,79	96.482,71	121.673,24	145.609,14
7.2. Pengangkutan Laut, Sungai dan Danau	-	-	-	-
7.3. Pengangkutan Udara	-	130,66	141,48	160,10
7.4. Jasa Penunjang Angkutan	82,07	291,54	326,16	336,14
7.5. Komunikasi	140,61	1.323,55	1.685,46	1.746,98
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	4.844,01	43.959,44	54.280,41	67.771,68
8.1. B a n k	517,70	23.613,28	27.371,63	39.808,23
8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank	339,64	1.661,41	2.041,27	2.544,43
8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-
8.4. Sewa Bangunan	3.986,67	18.684,75	24.867,51	25.419,02
8.5. Jasa Perusahaan	-	-	-	-
9. JASA-JASA	34.183,03	180.872,59	205.522,22	233.692,24
9.1. Pemerintahan Umum	30.479,31	168.495,72	191.573,16	217.829,89
9.2. Sosial Kemasyarakatan	1.658,31	6.284,61	7.137,15	8.110,10
9.3. Hiburan, Rekreasi dan Kebudayaan	65,94	147,64	164,37	192,92
9.4. Perorangan dan Rumah Tangga	1.979,46	5.944,62	6.647,54	7.559,34
P D R B BERLAKU	493.598,92	1.572.898,48	1.780.389,79	1.985.889,85

**) Angka Sementara

*) Angka Diperbaiki

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bener Meriah
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2009 - 2011 (Juta Rupiah)**

LAPANGAN USAHA	2000	2009*)	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	341.969,96	379.604,50	385.628,08	397.664,14
1.1. Tanaman Bahan Makanan	55.591,86	81.842,66	89.376,52	89.928,15
1.2. Tanaman Perkebunan	123.265,36	196.351,22	208.634,27	219.888,89
1.3. Peternakan	12.619,01	19.985,47	20.874,92	20.947,06
1.4. Kehutanan	149.958,44	80.651,63	65.948,51	66.106,05
1.5. Perikanan	535,28	773,52	793,86	793,99
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	3.390,43	5.867,44	6.364,27	6.872,11
2.1. Pertambangan Minyak dan Gas	-	-	-	-
2.2. Penggalian dan Penggaraman	3.390,43	5.867,44	6.364,27	6.872,11
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	16.335,47	25.241,61	26.894,31	29.709,33
3.1. Industri Migas	-	-	-	-
3.2. Industri tanpa Migas	16.335,47	25.241,61	26.894,31	29.709,33
4. LISTRIK DAN AIR MINUM	2.343,94	5.394,25	6.268,59	7.104,41
4.1. Listrik	2.343,94	5.268,41	6.134,75	6.957,41
4.2. Air Minum	-	125,84	133,84	147,00
5. BANGUNAN/KONTRUKSI	32.852,32	58.674,34	63.489,76	65.304,74
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	39.788,29	70.458,45	76.791,13	84.411,19
6.1. Perdagangan	37.906,45	67.472,18	73.548,66	81.045,99
6.2. Hotel	-	-	-	-
6.3. Restoran/Rumah makan	1.881,84	2.986,27	3.242,47	3.365,20
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	17.891,47	30.211,80	32.736,44	34.945,26
7.1. Pengangkutan Jalan Raya (Darat)	17.668,79	29.687,32	32.174,82	34.362,80
7.2. Pengangkutan Laut, Sungai dan Danau	-	-	-	-
7.3. Pengangkutan Udara	-	37,57	40,43	43,59
7.4. Jasa Penunjang Angkutan	82,07	114,75	119,82	123,17
7.5. Komunikasi	140,61	372,16	401,37	415,70
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	4.844,01	12.546,09	13.734,27	14.356,14
8.1. B a n k	517,70	5.304,23	5.764,08	6.234,91
8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank	339,64	561,40	583,92	631,62
8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-
8.4. Sewa Bangunan	3.986,67	6.680,46	7.386,27	7.489,61
8.5. Jasa Perusahaan	-	-	-	-
9. JASA-JASA	34.183,03	133.645,79	144.453,07	154.608,25
9.1. Pemerintahan Umum	30.479,31	127.862,18	138.204,15	147.797,29
9.2. Sosial Kemasyarakatan	1.658,31	2.643,67	2.878,04	3.126,11
9.3. Hiburan, Rekreasi dan Kebudayaan	65,94	95,34	102,26	111,78
9.4. Perorangan dan Rumah Tangga	1.979,46	3.044,60	3.268,62	3.573,06
P D R B KONSTAN	493.598,92	721.644,27	756.359,92	794.975,57

**) Angka Sementara

*) Angka Diperbaiki

**Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha Atas
Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 - 2011**

LAPANGAN USAHA	2000	2009	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	69,28	49,66	47,22	45,28
1.1. Tanaman Bahan Makanan	11,26	12,55	12,77	12,57
1.2. Tanaman Perkebunan	24,97	24,46	24,24	23,33
1.3. Peternakan	2,56	2,40	2,35	2,28
1.4. Kehutanan	30,38	10,15	7,77	7,02
1.5. Perikanan	0,11	0,09	0,09	0,09
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0,69	0,71	0,74	0,75
2.1. Pertambangan Minyak dan Gas	-	-	-	-
2.2. Penggalian dan Penggaraman	0,69	0,71	0,74	0,75
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	3,31	2,95	2,91	2,89
3.1. Industri Migas	-	-	-	-
3.2. Industri tanpa Migas	3,31	2,95	2,91	2,89
4. LISTRIK DAN AIR MINUM	0,47	0,79	0,92	1,01
4.1. Listrik	0,47	0,76	0,89	0,99
4.2. Air Minum	-	0,02	0,02	0,03
5. BANGUNAN/KONTRUKSI	6,66	17,48	18,24	18,37
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	8,06	7,88	8,42	9,08
6.1. Perdagangan	7,68	7,47	8,00	8,62
6.2. Hotel	-	-	-	-
6.3. Restoran/Rumah makan	0,38	0,41	0,42	0,46
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	3,62	6,25	6,96	7,45
7.1. Pengangkutan Jalan Raya (Darat)	3,58	6,13	6,83	7,33
7.2. Pengangkutan Laut, Sungai dan Danau	0,00	-	-	-
7.3. Pengangkutan Udara	-	0,01	0,01	0,01
7.4. Jasa Penunjang Angkutan	0,02	0,02	0,02	0,02
7.5. Komunikasi	0,03	0,08	0,09	0,09
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	0,98	2,79	3,05	3,41
8.1. B a n k	0,10	1,50	1,54	2,00
8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,07	0,11	0,11	0,13
8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-
8.4. Sewa Bangunan	0,81	1,19	1,40	1,28
8.5. Jasa Perusahaan	-	-	-	-
9. JASA-JASA	6,93	11,50	11,54	11,77
9.1. Pemerintahan Umum	6,17	10,71	10,76	10,97
9.2. Sosial Kemasyarakatan	0,34	0,40	0,40	0,41
9.3. Hiburan, Rekreasi dan Kebudayaan	0,01	0,01	0,01	0,01
9.4. Perorangan dan Rumah Tangga	0,40	0,38	0,37	0,38
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00

**Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009 - 2011**

LAPANGAN USAHA	2000	2009	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	69,28	52,60	50,98	50,02
1.1. Tanaman Bahan Makanan	11,26	11,34	11,82	11,31
1.2. Tanaman Perkebunan	24,97	27,21	27,58	27,66
1.3. Peternakan	2,56	2,77	2,76	2,63
1.4. Kehutanan	30,38	11,18	8,72	8,32
1.5. Perikanan	0,11	0,11	0,10	0,10
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0,69	0,81	0,84	0,86
2.1. Pertambangan Minyak dan Gas	-	-	-	-
2.2. Penggalian dan Penggaraman	0,69	0,81	0,84	0,86
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	3,31	3,50	3,56	3,74
3.1. Industri Migas	-	-	-	-
3.2. Industri tanpa Migas	3,31	3,50	3,56	3,74
4. LISTRIK DAN AIR MINUM	0,47	0,75	0,83	0,89
4.1. Listrik	0,47	0,73	0,81	0,88
4.2. Air Minum	-	0,02	0,02	0,02
5. BANGUNAN/KONTRUKSI	6,66	8,13	8,39	8,21
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	8,06	9,76	10,15	10,62
6.1. Perdagangan	7,68	9,35	9,72	10,19
6.2. Hotel	-	-	-	-
6.3. Restoran/Rumah makan	0,38	0,41	0,43	0,42
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	3,62	4,19	4,33	4,40
7.1. Pengangkutan Jalan Raya (Darat)	3,58	4,11	4,25	4,32
7.2. Pengangkutan Laut, Sungai dan Danau	-	-	-	-
7.3. Pengangkutan Udara	-	0,01	0,01	0,01
7.4. Jasa Penunjang Angkutan	0,02	0,02	0,02	0,02
7.5. Komunikasi	0,03	0,05	0,05	0,05
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	0,98	1,74	1,82	1,81
8.1. B a n k	0,10	0,74	0,76	0,78
8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,07	0,08	0,08	0,08
8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-
8.4. Sewa Bangunan	0,81	0,93	0,98	0,94
8.5. Jasa Perusahaan	-	-	-	-
9. JASA-JASA	6,93	18,52	19,10	19,45
9.1. Pemerintahan Umum	6,17	17,72	18,27	18,59
9.2. Sosial Kemasyarakatan	0,34	0,37	0,38	0,39
9.3. Hiburan, Rekreasi dan Kebudayaan	0,01	0,01	0,01	0,01
9.4. Perorangan dan Rumah Tangga	0,40	0,42	0,43	0,45
J U M L A H	100,00	100,00	100,00	100,00

**Tabel 5. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha Atas
Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 - 2011
(Tahun 2000 = 100)**

LAPANGAN USAHA	2000	2009	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	100,00	228,39	245,84	262,93
1.1. Tanaman Bahan Makanan	100,00	355,14	408,96	449,02
1.2. Tanaman Perkebunan	100,00	312,11	350,12	375,79
1.3. Peternakan	100,00	299,11	331,44	358,23
1.4. Kehutanan	100,00	106,48	92,28	92,94
1.5. Perikanan	100,00	271,57	295,66	320,73
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	100,00	331,42	388,20	441,64
2.1. Pertambangan Minyak dan Gas	-	-	-	-
2.2. Penggalian dan Penggaraman	100,00	331,42	388,20	441,64
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	100,00	283,88	317,25	351,04
3.1. Industri Migas	-	-	-	-
3.2. Industri tanpa Migas	100,00	283,88	317,25	351,04
4. LISTRIK DAN AIR MINUM	100,00	529,29	697,16	857,18
4.1. Listrik	100,00	513,31	679,40	834,79
4.2. Air Minum	-	-	-	-
5. BANGUNAN/KONTRUKSI	100,00	836,86	988,55	1.110,31
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	100,00	311,32	376,92	453,05
6.1. Perdagangan	100,00	309,83	375,89	451,66
6.2. Hotel	-	-	-	-
6.3. Restoran/Rumah makan	100,00	341,30	397,60	481,12
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	100,00	549,02	692,10	826,38
7.1. Pengangkutan Jalan Raya (Darat)	100,00	546,06	688,63	824,10
7.2. Pengangkutan Laut, Sungai dan Danau	-	-	-	-
7.3. Pengangkutan Udara	-	-	-	-
7.4. Jasa Penunjang Angkutan	100,00	355,23	397,42	409,58
7.5. Komunikasi	100,00	941,29	1.198,67	1.242,42
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	100,00	907,50	1.120,57	1.399,08
8.1. B a n k	100,00	4.561,19	5.287,16	7.689,44
8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank	100,00	489,17	601,01	749,16
8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-
8.4. Sewa Bangunan	100,00	468,68	623,77	637,60
8.5. Jasa Perusahaan	-	-	-	-
9. JASA-JASA	100,00	529,13	601,24	683,65
9.1. Pemerintahan Umum	100,00	552,82	628,54	714,68
9.2. Sosial Kemasyarakatan	100,00	378,98	430,39	489,06
9.3. Hiburan, Rekreasi dan Kebudayaan	100,00	223,88	249,25	292,54
9.4. Perorangan dan Rumah Tangga	100,00	300,31	335,83	381,89
P D R B BERLAKU	100,00	318,66	360,70	402,33

**Tabel 6. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009 - 2011
(Tahun 2000 = 100)**

LAPANGAN USAHA	2000	2009	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	100,00	111,01	112,77	116,29
1.1. Tanaman Bahan Makanan	100,00	147,22	160,77	161,76
1.2. Tanaman Perkebunan	100,00	159,29	169,26	178,39
1.3. Peternakan	100,00	158,38	165,42	166,00
1.4. Kehutanan	100,00	53,78	43,98	44,08
1.5. Perikanan	100,00	144,51	148,31	148,33
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	100,00	173,06	187,71	202,69
2.1. Pertambangan Minyak dan Gas	-	-	-	-
2.2. Penggalian dan Penggaraman	100,00	173,06	187,71	202,69
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	100,00	154,52	164,64	181,87
3.1. Industri Migas	-	-	-	-
3.2. Industri tanpa Migas	100,00	154,52	164,64	181,87
4. LISTRIK DAN AIR MINUM	100,00	230,14	267,44	303,10
4.1. Listrik	100,00	224,77	261,73	296,83
4.2. Air Minum	-	-	-	-
5. BANGUNAN/KONTRUKSI	100,00	178,60	193,26	198,78
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	100,00	177,08	193,00	212,15
6.1. Perdagangan	100,00	178,00	194,03	213,81
6.2. Hotel	-	-	-	-
6.3. Restoran/Rumah makan	100,00	158,69	172,30	178,82
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	100,00	168,86	182,97	195,32
7.1. Pengangkutan Jalan Raya (Darat)	100,00	168,02	182,10	194,48
7.2. Pengangkutan Laut, Sungai dan Danau	-	-	-	-
7.3. Pengangkutan Udara	-	-	-	-
7.4. Jasa Penunjang Angkutan	100,00	139,82	146,00	150,08
7.5. Komunikasi	100,00	264,67	285,45	295,64
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	100,00	259,00	283,53	296,37
8.1. B a n k	100,00	1.024,58	1.113,40	1.204,35
8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank	100,00	165,29	171,92	185,97
8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-
8.4. Sewa Bangunan	100,00	167,57	185,27	187,87
8.5. Jasa Perusahaan	-	-	-	-
9. JASA-JASA	100,00	390,97	422,59	452,30
9.1. Pemerintahan Umum	100,00	419,50	453,44	484,91
9.2. Sosial Kemasyarakatan	100,00	159,42	173,55	188,51
9.3. Hiburan, Rekreasi dan Kebudayaan	100,00	144,58	155,07	169,51
9.4. Perorangan dan Rumah Tangga	100,00	153,81	165,13	180,51
P D R B KONSTAN	100,00	146,20	153,23	161,06

**Tabel 7. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Berlaku Tahun 2009 - 2011
(Tahun Sebelumnya = 100)**

LAPANGAN USAHA	2000	2009	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	100,00	106,13	107,64	106,95
1.1. Tanaman Bahan Makanan	100,00	115,20	115,15	109,80
1.2. Tanaman Perkebunan	100,00	112,55	112,18	107,33
1.3. Peternakan	100,00	113,86	110,81	108,08
1.4. Kehutanan	100,00	84,81	86,66	100,72
1.5. Perikanan	100,00	109,83	108,87	108,48
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	100,00	114,78	117,13	113,77
2.1. Pertambangan Minyak dan Gas	-	-	-	-
2.2. Penggalian dan Penggaraman	100,00	114,78	117,13	113,77
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	100,00	108,67	111,76	110,65
3.1. Industri Migas	-	-	-	-
3.2. Industri tanpa Migas	100,00	108,67	111,76	110,65
4. LISTRIK DAN AIR MINUM	100,00	133,57	131,72	122,95
4.1. Listrik	100,00	134,24	132,36	122,87
4.2. Air Minum	-	115,07	111,11	126,04
5. BANGUNAN/KONTRUKSI	100,00	154,59	118,13	112,32
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	100,00	122,10	121,07	120,20
6.1. Perdagangan	100,00	122,76	121,32	120,16
6.2. Hotel	-	-	-	-
6.3. Restoran/Rumah makan	100,00	111,18	116,49	121,01
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	100,00	127,87	126,06	119,40
7.1. Pengangkutan Jalan Raya (Darat)	100,00	127,65	126,11	119,67
7.2. Pengangkutan Laut, Sungai dan Danau	-	-	-	-
7.3. Pengangkutan Udara	-	109,87	108,28	113,16
7.4. Jasa Penunjang Angkutan	100,00	128,84	111,87	103,06
7.5. Komunikasi	100,00	147,99	127,34	103,65
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	100,00	146,23	123,48	124,85
8.1. B a n k	100,00	137,75	115,92	145,44
8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank	100,00	144,11	122,86	124,65
8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-
8.4. Sewa Bangunan	100,00	158,79	133,09	102,22
8.5. Jasa Perusahaan	-	-	-	-
9. JASA-JASA	100,00	112,99	113,63	113,71
9.1. Pemerintahan Umum	100,00	113,14	113,70	113,71
9.2. Sosial Kemasyarakatan	100,00	110,99	113,57	113,63
9.3. Hiburan, Rekreasi dan Kebudayaan	100,00	109,65	111,33	117,37
9.4. Perorangan dan Rumah Tangga	100,00	110,83	111,82	113,72
P D R B BERLAKU	100,00	117,04	113,19	111,54

**Tabel 8. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Tahun 2009 - 2011
(Tahun Sebelumnya = 100)**

LAPANGAN USAHA	2000	2009	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	100,00	101,17	101,59	103,12
1.1. Tanaman Bahan Makanan	100,00	109,60	109,21	100,62
1.2. Tanaman Perkebunan	100,00	108,26	106,26	105,39
1.3. Peternakan	100,00	108,25	104,45	100,35
1.4. Kehutanan	100,00	80,67	81,77	100,24
1.5. Perikanan	100,00	106,31	102,63	100,02
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	100,00	109,74	108,47	107,98
2.1. Pertambangan Minyak dan Gas	-	-	-	-
2.2. Penggalian dan Penggaraman	100,00	109,74	108,47	107,98
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	100,00	106,61	106,55	110,47
3.1. Industri Migas	-	-	-	-
3.2. Industri tanpa Migas	100,00	106,61	106,55	110,47
4. LISTRIK DAN AIR MINUM	100,00	129,42	116,21	113,33
4.1. Listrik	100,00	130,03	116,44	113,41
4.2. Air Minum	-	108,26	106,36	109,83
5. BANGUNAN/KONTRUKSI	100,00	108,70	108,21	102,86
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	100,00	108,03	108,99	109,92
6.1. Perdagangan	100,00	108,07	109,01	110,19
6.2. Hotel	-	-	-	-
6.3. Restoran/Rumah makan	100,00	107,24	108,58	103,78
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	100,00	108,37	108,36	106,75
7.1. Pengangkutan Jalan Raya (Darat)	100,00	108,41	108,38	106,80
7.2. Pengangkutan Laut, Sungai dan Danau	-	-	-	-
7.3. Pengangkutan Udara	-	107,84	107,61	107,81
7.4. Jasa Penunjang Angkutan	100,00	104,83	104,42	102,80
7.5. Komunikasi	100,00	106,78	107,85	103,57
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	100,00	110,08	109,47	104,53
8.1. B a n k	100,00	108,06	108,67	108,17
8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank	100,00	107,20	104,01	108,17
8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-
8.4. Sewa Bangunan	100,00	112,00	110,57	101,40
8.5. Jasa Perusahaan	-	-	-	-
9. JASA-JASA	100,00	108,27	108,09	107,03
9.1. Pemerintahan Umum	100,00	108,25	108,09	106,94
9.2. Sosial Masyarakat	100,00	109,53	108,87	108,62
9.3. Hiburan, Rekreasi dan Kebudayaan	100,00	106,64	107,26	109,31
9.4. Perorangan dan Rumah Tangga	100,00	108,03	107,36	109,31
P D R B KONSTAN	100,00	104,54	104,81	105,11

**Tabel 9. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2009 - 2011**

LAPANGAN USAHA	2000	2009	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	100,00	205,75	218,01	226,11
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	100,00	191,51	206,80	217,89
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	100,00	183,71	192,70	193,02
4. LISTRIK DAN AIR MINUM	100,00	229,99	260,68	282,81
5. BANGUNAN/KONTRUKSI	100,00	468,56	511,52	558,55
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	100,00	175,81	195,30	213,55
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	100,00	325,13	378,25	423,10
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	100,00	350,38	395,22	472,07
9. JASA-JASA	100,00	135,34	142,28	151,15
P D R B	100,00	217,96	235,39	249,81

**Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2009 - 2011**

LAPANGAN USAHA	2000	2009	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	100,00	104,89	105,96	103,71
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	100,00	104,59	107,99	105,36
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	100,00	101,93	104,89	100,17
4. LISTRIK DAN AIR MINUM	100,00	103,20	113,34	108,49
5. BANGUNAN/KONTRUKSI	100,00	142,21	109,17	109,20
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	100,00	113,02	111,09	109,35
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	100,00	117,99	116,34	111,86
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	100,00	132,83	112,80	119,45
9. JASA-JASA	100,00	104,36	105,13	106,24
P D R B	100,00	111,95	108,00	106,12

**Tabel 10. Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bener Meriah
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 - 2011**

P E R I N C I A N	2000	2009 *)	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA PASAR (JUTAAN RUPIAH)	493.598,92	1.572.898,48	1.780.389,79	1.985.889,85
PENYUSUTAN (JUTAAN RUPIAH)	10.365,58	31.631,15	40.948,97	39.936,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETTO ATAS DASAR HARGA PASAR (JUTAAN RUPIAH)	483.233,34	1.541.267,33	1.739.440,82	1.945.953,41
PAJAK TAK LANGSUNG (JUTAAN RUPIAH)	15.995,02	50.923,47	57.471,12	64.294,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETTO ATAS DASAR BIAYA FAKTOR (JUTAAN RUPIAH)	467.238,32	1.490.343,86	1.681.969,70	1.881.659,11
PENDUDUK (JIWA)	104.850	114.464	122.277	125.076
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA (RUPIAH)	4.707.667,35	13.741.425,08	14.560.299,89	15.877.465,33
PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA (RUPIAH)	4.456.254,85	13.020.197,28	13.755.405,35	15.044.126,05

**). Angka Sementara

*). Angka Diperbaiki

**Tabel 11. Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bener Meriah
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009 - 2011**

P E R I N C I A N	2000	2009 *)	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA PASAR (JUTAAN RUPIAH)	493.598,92	721.644,27	756.359,92	794.975,57
PENYUSUTAN (JUTAAN RUPIAH)	10.365,58	15.376,07	17.396,28	16.938,54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETTO ATAS DASAR HARGA PASAR (JUTAAN RUPIAH)	483.233,34	706.268,20	738.963,64	778.037,03
PAJAK TAK LANGSUNG (JUTAAN RUPIAH)	15.995,02	23.342,16	24.422,75	25.714,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETTO ATAS DASAR BIAYA FAKTOR (JUTAAN RUPIAH)	467.238,32	682.926,03	714.540,89	752.322,90
PENDUDUK (JIWA)	104.850	114.464	122.277	126.158
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA (RUPIAH)	4.707.667,35	6.304.552,26	6.185.627,06	6.301.428,13
PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA (RUPIAH)	4.456.254,85	5.966.295,36	5.843.624,67	5.963.338,84

**). Angka Sementara

*) Angka Diperbaiki

**Tabel 12. Indeks Perkembangan Pendapatan Regional dan Angka Perkapita
Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2009 - 2011 (Tahun 2000 = 100)**

P E R I N C I A N	2000	2009	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA PASAR	100,00	318,66	360,70	402,33
PENYUSUTAN	100,00	305,16	395,05	385,28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETTO ATAS DASAR HARGA PASAR	100,00	318,95	359,96	402,69
PAJAK TAK LANGSUNG	100,00	318,37	359,31	401,96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETTO ATAS DASAR BIAYA FAKTOR	100,00	318,97	359,98	402,72
P E N D U D U K	100,00	109,17	116,62	119,29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA	100,00	291,89	309,29	337,27
PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA	100,00	292,18	308,68	337,60

**Tabel 13 Indeks Perkembangan Pendapatan Regional dan Angka Perkapita
Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2009 - 2011 (Tahun 2000 = 100)**

P E R I N C I A N	2000	2009	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA PASAR	100,00	146,20	153,23	161,06
PENYUSUTAN	100,00	148,34	167,83	163,41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETTO ATAS DASAR HARGA PASAR	100,00	146,15	152,92	161,01
PAJAK TAK LANGSUNG	100,00	145,93	152,69	160,76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETTO ATAS DASAR BIAYA FAKTOR	100,00	146,16	152,93	161,01
P E N D U D U K	100,00	109,17	116,62	120,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA	100,00	133,92	131,39	133,85
PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA	100,00	133,89	131,13	133,82

**Tabel 14. Indeks Berantai Pendapatan Regional dan Angka Perkapita
Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2009 - 2011 (Tahun Sebelumnya = 100)**

P E R I N C I A N	2000	2009	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA PASAR	100,00	117,04	113,19	111,54
PENYUSUTAN	100,00	117,04	129,46	97,53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETTO ATAS DASAR BIAYA FAKTOR	100,00	117,04	112,86	111,87
PAJAK TAK LANGSUNG	100,00	117,04	112,86	111,87
PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETTO ATAS DASAR BIAYA FAKTOR	100,00	117,04	112,86	111,87
P E N D U D U K	100,00	101,70	106,83	102,29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA	100,00	115,08	105,96	109,05
PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA	100,00	115,08	105,65	109,37

**Tabel 15. Indeks Berantai Pendapatan Regional dan Angka Perkapita
Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2009 - 2011 (Tahun Sebelumnya = 100)**

P E R I N C I A N	2000	2009	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA PASAR	100,00	104,54	104,81	105,11
PENYUSUTAN	100,00	104,54	113,14	97,37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETTO ATAS DASAR HARGA PASAR	100,00	104,54	104,63	105,29
PAJAK TAK LANGSUNG	100,00	104,54	104,63	105,29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETTO ATAS DASAR BIAYA FAKTOR	100,00	104,54	104,63	105,29
P E N D U D U K	100,00	101,70	106,83	103,17
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA	100,00	102,79	98,11	101,87
PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA	100,00	102,79	97,94	102,05

**Tabel 16. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Regional Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2009 - 2011**

P E R I N C I A N	2009	2010	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. P D R B	17,04	13,19	11,54
2. PENDAPATAN REGIONAL	17,04	29,46	-2,47
3. PDRB PER KAPITA	15,08	5,96	9,05
4. PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA	15,08	5,65	9,37
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
1. P D R B	4,54	4,81	5,11
2. PENDAPATAN REGIONAL	4,54	4,63	5,29
3. PDRB PER KAPITA	2,79	-1,89	1,87
4. PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA	2,79	-2,06	2,05

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BENER MERIAH
JLN. BANDARA REMBELE - PANTERAYA
EMAIL: bps1117@mailhost.bps.go.id**